



KEMENTERIAN KEUANGAN R.I.  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Jalan Tjilik Riwut KM. 1 No. 10 Palangka Raya (73111)  
Telepon (0536) 3221215 Faksimile (0536)  
Situs [www.kanwildjpbknkalteng.com](http://www.kanwildjpbknkalteng.com)

Nomor : S- **0716** /MPB.18/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Penyampaian Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2018

8 Mei 2018

Yth. Direktur Jenderal Perbendaharaan  
c.q. Direktorat Pelaksanaan Anggaran  
di Jakarta

Sehubungan dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-61/PB/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Kajian Fiskal Regional, bersama ini kami sampaikan Kajian Fiskal Regional Triwulan I Tahun 2018 Provinsi Kalimantan Tengah. Adapun *softcopy* kajian dimaksud kami kirimkan ke alamat *email* [ditpa@kemenkeu.go.id](mailto:ditpa@kemenkeu.go.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Pth. Kepala Kantor,

*Prabowo*  
Prayu Prabowo

NIP. 196608061998031001



**KEMENTERIAN KEUANGAN  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

# **KAJIAN FISKAL REGIONAL**

**Triwulan I Tahun 2018**



**KANWIL DITJEN  
PERBENDAHARAAN**

**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
<b>BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL</b>	<b>1</b>
A Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	1
B Inflasi	2
C Indikator Kesejahteraan	2
<b>BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN</b>	<b>4</b>
A Pendapatan Negara	4
1. Penerimaan Perpajakan	5
a. Pajak Penghasilan (PPh)	5
b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	5
c. Pajak Lainnya	6
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	6
B Belanja Negara	7
1. Belanja Pemerintah Pusat	7
2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)	8
C Prognosis Realisasi APBN	8
<b>BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD</b>	<b>10</b>
A Pendapatan Daerah	10
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	10
a. Penerimaan Pajak Daerah	10
b. Penerimaan Retribusi Daerah	11
c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ( KDYD)	12
d. Lain-Lain PAD Yang Sah	12
2. Pendapatan Transfer	12
B Belanja Daerah	13
1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal & Bansos	14
2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan	15
C Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Semester I Tahun 2018	15
<b>BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN</b>	<b>17</b>
A LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN	17
B PENDAPATAN KONSOLIDASIAN	17
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan	18
2. Analisis Perubahan	19
3. Analisis pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian	19
C BELANJA KONSOLIDASIAN	20
1. Analisis Proporsi dan Perbandingan	20
2. Analisis Perubahan	20
3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal Kepada Indikator Ekonomi Regional	21

D ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PDRB	22
BAB V RE- <i>BUILDING</i> APLIKASI SIKP	23
DAFTAR LAMPIRAN	v

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1	:	I Account APBN di Provinsi Kalimantan Tengah 2017-2018 (juta rupiah)	4
Tabel II.2	:	Perkembangan Penerimaan Lima PNBPN Triwulan I TA 2016-2018 (juta rupiah, persen)	7
Tabel II.3	:	Prognosis Realisasi APBN Prov. Kalteng s.d Triwulan II-2018 (juta rupiah)	9
Tabel III.1	:	I Account Pendapatan APBD Pemda se-Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I TA 2017-2018 (rupiah)	10
Tabel III.2	:	Perkembangan Penerimaan KDYD (persen)	12
Tabel III.3	:	I Account Belanja APBD Pemda se-Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I TA 2017-2018 (rupiah)	13
Tabel III.4	:	I Account Pembiayaan APBD Pemda se-Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I TA 2017-2018 (rupiah)	14
Tabel III.5	:	Perkiraan Realisasi APBD Pemda Se-Prov. Kalteng s.d. Semester I-2018 (juta rupiah)	16
Tabel IV.1	:	LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Prov. Kalteng 2017-2018 (juta rupiah)	17
Tabel IV.2	:	Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemda dan Pusat sampai dengan Triwulan I TA 2017-2018	20
Tabel IV.3	:	Pengaruh Fiskal terhadap Indikator Ekonomi di Kalteng Triwulan I-2018	22
Tabel IV.4	:	Kontribusi Komponen, Y, G, dan I (juta rupiah) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Triwulan I-2018	22

## DAFTAR GRAFIK

Grafik I.1	: Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Triwulanan 2016-2018 (persen)	1
Grafik I.2	: Inflasi Bulanan Kalteng dan Nasional Tahun 2018 (%)	2
Grafik I.3	: Target dan Realisasi TPT Kalteng 2018-2018 (persen)	3
Grafik I.4	: Angka Kemiskinan (persen) & Penduduk Miskin Kalimantan Tengah Tahun 2015-2018	3
Grafik II.1	: Perkembangan Penerimaan PPh Triwulan I TA 2017 dan 2018 (persen)	5
Grafik II.2	: Perkembangan Penerimaan PPN Triwulan I TA 2017 dan 2018 (persen)	6
Grafik II.3	: Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Triwulan I-2017 dan 2018 (persen)	7
Grafik II.4	: Perkembangan Realisasi Dana Transfer Triwulan I-2018 (%)	8
Grafik III.1	: Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah antar Triwulan (persen)	11
Grafik III.2	: Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah antar Triwulan (persen)	11
Grafik III.3	: Perbandingan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah antar Triwulan (persen)	12
Grafik III.4	: Perkembangan Penerimaan Dana Transfer Triwulan I TA 2016-2108 (persen)	13
Grafik III.5	: Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2016-2018 (persen)	14
Grafik III.6	: Pagu Belanja APBD per-Urusan 2016 – 2018 (persen)	15
Grafik IV.1	: Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasi Prov. Kalimantan Tengah Triwulan I 2017-2018 (juta, persen)	18
Grafik IV.2	: Perbandingan Penerimaan Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian Triwulan I 2018 (juta, persen)	18
Grafik IV.3	: Distribusi Pendapatan Pajak & PNBK Triwulan I 2017-2018(juta, persen)	19
Grafik IV.4	: Perbandingan Belanja & Transfer Pem. Pusat & Pemda Terhadap Belanja & Transfer Konsolidasian Prov. Kalteng Triwulan I-2018 (miliar rupiah)	20
Grafik IV.5	: Komposisi Belanja Konsolidasian Prov. Kalteng Triwulan I-2017	21
Grafik IV.6	: Komposisi Belanja Konsolidasian Prov. Kalteng Triwulan I-2018	21



## BAB I PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

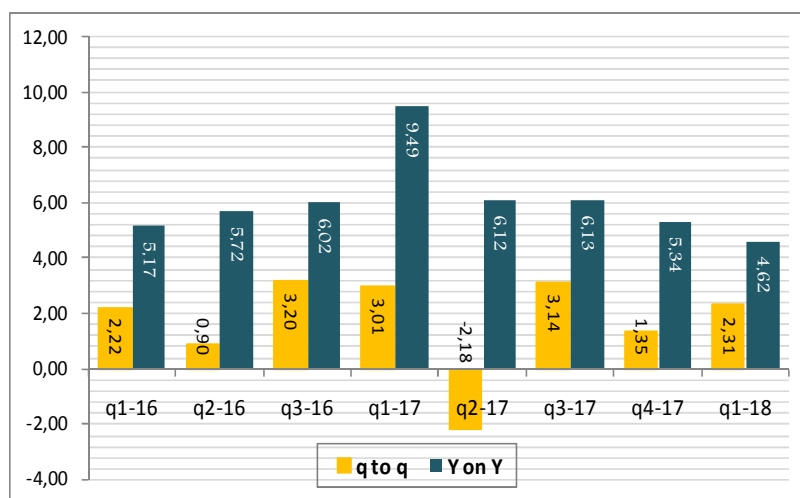
### A. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Target Pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2018 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebesar 6,5 persen, sama dengan target di tahun lalu. Target itu berbeda dengan target dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 sebesar 8,2 persen. Kondisi ini disesuaikan dengan realisasi capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2014, 2015, 2016 dan 2017.

Pada triwulan I-2018 capaian pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah sebesar 4,62 persen (Y on Y), atau mencapai Rp33.918,1 miliar (ADHB) tumbuh melambat dari capaian triwulan IV-2017 yang tumbuh sebesar 6,12 persen. Capaian ini jauh lebih rendah dari periode yang sama tahun 2017 sebesar 8,49 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi disumbang kategori pengadaan listrik dan gas yang tumbuh 9,97 persen. Hanya kategori pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraktif -0,24 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan didorong oleh semua komponen. Komponen dengan pertumbuhan tertinggi adalah Konsumsi Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRRT) sebesar 11,07 persen.

Jika dibanding kuartal IV-2017, perekonomian Kalimantan Tengah tumbuh 2,31 persen (q to q). Dari sisi produksi penyumbang pertumbuhan terbesar kategori transportasi dan pergudangan 18,96 persen. Sedangkan kategori konstruksi, jasa keuangan, real estate dan administrasi pemerintah mengalami kontraksi. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai komponen ekspor sebesar 8,98 persen, sementara komponen konsumsi pemerintah dan PMTB mengalami kontraksi, masing-masing -10,95 persen dan -7,22 persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Grafik I.1.

Grafik I.1 Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Triwulanan 2016-2018 (persen)



Dalam wilayah regional Pulau Kalimantan, pertumbuhan ekonomi tertinggi (Y on Y) adalah Kaltara 5,56 persen, Kalbar 5,11 persen, Kalsel 5,01 persen, Kalteng 4,62 persen, Kaltim 1,77 persen.

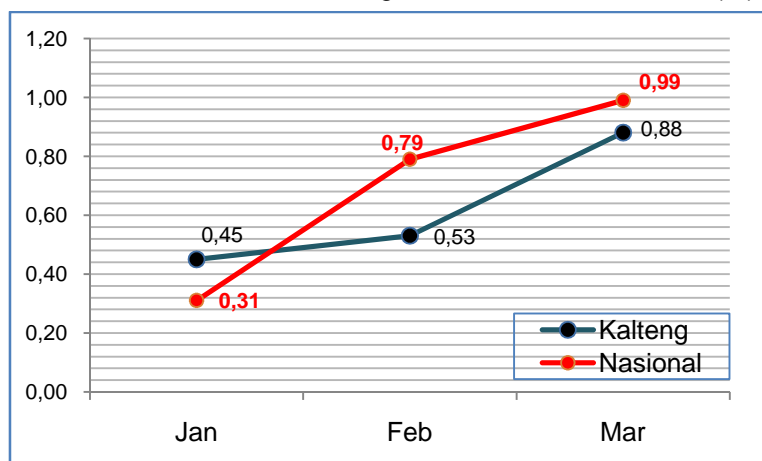
Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah

Adapun struktur perekonomian di Pulau Kalimantan, PDRB Kalimantan Tengah memberikan kontribusi 11,4 persen, menempati urutan keempat setelah Kalimantan Timur 52,4 persen, Kalimantan Barat 15,8 persen, Kalimantan Selatan 13,4 persen dan urutan terakhir adalah Kalimantan Utara sebesar 7,0 persen.

## B. Inflasi

Target tingkat inflasi dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 tahun 2018 sebesar 4,3 persen sampai dengan 4,4 persen. Pada kuartal I-2018 tingkat inflasi kumulatif sebesar 0,88 persen, lebih rendah dari inflasi nasional 0,99 persen. Pada Januari terjadi inflasi 0,45 persen. Seluruh kelompok pengeluaran selain transportasi, komunikasi dan jasa keuangan turut memberi andil atas angka tersebut, dengan bahan makanan sebagai faktor yang paling dominan. Bulan Februari 2018 terjadi inflasi yang cukup rendah 0,08 persen.

Grafik I.2 Inflasi Bulanan Kalteng dan Nasional Tahun 2018 (%)



Selanjutnya pada bulan Maret 2018, terjadi inflasi sebesar 0,35 persen yang sebagian besar berasal dari kelompok pengeluaran bahan makanan dengan kontribusi di atas 0,20 persen. Hal ini seperti tergambar pada Grafik I.2

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah

Di wilayah regional Pulau Kalimantan, inflasi kumulatif sebesar 0,88 persen adalah yang tertinggi kedua setelah Kalimantan Barat (1,19 persen) Urutan ketiga adalah Kalimantan Timur (0,6 persen) diikuti Kalimantan Utara (0,55 persen). Sedangkan Kalimantan Selatan memiliki tingkat inflasi kumulatif terkecil (0,47 persen), dimana pada bulan Februari Provinsi Kalsel mengalami deflasi sebesar 0,14 persen.

## C. Indikator Kesejahteraan

Pada RPJMD Prov. Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di tahun 2018 diproyeksikan 4,0 persen, lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 4,5 persen. Namun demikian, proyeksi ini lebih tinggi dari target RPJM Nasional yang hanya sebesar 2,4 persen.

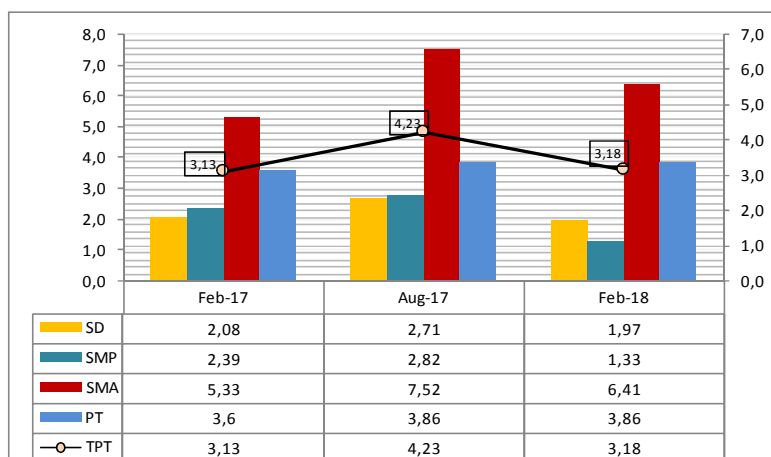
Kondisi TPT pada Februari 2017 sebesar 3,13 persen dan pada Agustus 2017 melonjak menjadi 4,23 persen. Pada Februari 2016 turun menjadi 3,18 persen, namun jika dibandingkan dengan periode Februari 2017 mengalami kenaikan 0,05 persen. TPT



pada perkotaan cenderung lebih tinggi dari pada di perdesaan. Pada 2018, TPT di perkotaan sebesar 4,2 persen, sedangkan di perdesaan 2,52 persen.

Dalam wilayah regional Pulau Kalimantan TPT Provinsi Kalimantan Tengah 4,23 persen merupakan yang terendah. Sedangkan TPT yang paling tinggi adalah Kaltim (6,91 persen), diikuti Kaltara (5,54 persen), Kalsel (4,77 persen) dan Kalbar (4,36 persen).

Grafik I.3 Target dan Realisasi TPT Kalteng 2017-2018 (persen)

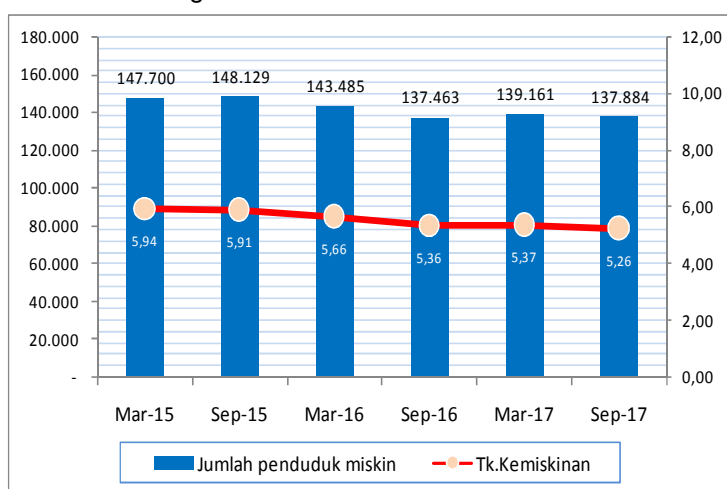


Jika ditilik dari tingkat pendidikan TPT tertinggi terjadi pada lulusan SMA/SMK sebesar 6,41 persen, tingkat Diploma/Universitas sebesar 3,86 persen, sedangkan TPT pada tingkat SMP 1,33 persen dan SD sebesar 1,97 persen, seperti grafik I.3.

Sumber : BPS Kalteng dan KUA APBD Pemprov TA 2018

Selain TPT, indikator kesejahteraan adalah angka kemiskinan penduduk. Sesuai data rilis terbaru dari BPS Prov. Kalteng, angka kemiskinan penduduk Kalteng bulan September 2017 sebesar 5,26 persen. Berkurang 0,10 persen dari periode September 2016 yang sebesar 5,36 persen. Namun demikian, jumlah penduduk miskin bertambah 421 jiwa dari 137.463 jiwa menjadi 137.884 jiwa yang tersebar 48.337 di perkotaan dan 89.547 di perdesaan. Selengkapnya tersaji pada grafik I.4 di bawah ini.

Grafik I.4 Angka Kemiskinan (persen) & Penduduk Miskin Kalimantan Tengah Tahun 2015-2018



Sumber : BPS Prov. Kalimantan Tengah

Jika dibanding dengan tingkat kemiskinan regional Pulau Kalimantan dan Nasional, angka kemiskinan Kalteng 5,26 persen berada di bawah Kalsel 4,70 persen. Sedangkan Kaltim 6,08 persen, Kaltara 6,96 persen, dan tertinggi di Kalbar 7,86 persen. Semua angka kemiskinan di Kalimantan lebih rendah angka kemiskinan nasional sebesar 10,64 persen.

## BAB II

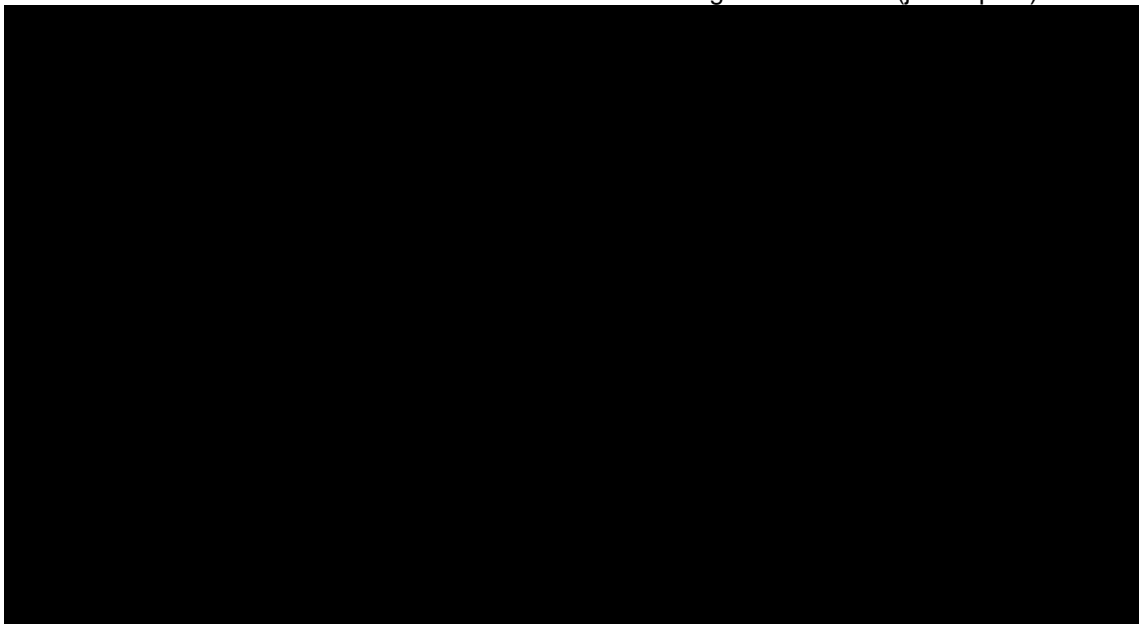
### PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

#### B. Pendapatan Negara

Target pendapatan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan sebesar 1,2 persen dari tahun 2017. Sedangkan alokasi belanja pemerintah mengalami penurunan sebesar 8,5 persen. Walaupun secara agregat mengalami penurunan, namun alokasi belanja pemerintah pusat pada instansi vertikal Kementerian/Lembaga (K/L) meningkat sebesar 8,0 persen.

Belanja transfer pemerintah dari pusat kepada pemerintah daerah turun sebesar 13,3 persen. Komponen belanja transfer yang mengalami penurunan adalah DBH sebesar 62,6 persen, dengan perincian DBH SDA berkurang 68,1 persen dari Rp3.178,9 miliar menjadi Rp1.012,7 miliar dan DBH pajak turun 46,0 persen dari Rp1.053,2 miliar menjadi Rp568,3 miliar. Penurunan alokasi DBH karena harga hasil pertambangan dan kehutanan dipengaruhi oleh perekonomian global. Dana Desa tahun 2018 juga berkurang sebesar sekitar Rp3,8 miliar. Penurunan Dana Desa disebabkan adanya faktor perhitungan alokasi/formula dari Ditjen Perimbangan.

Tabel II.1 | Account APBN di Provinsi Kalimantan Tengah 2017-2018 (juta rupiah)



Sumber : Bidang PPK-Kanwil DJPB Prov. Kalteng & Kanwil Pajak

Adapun kenaikan belanja K/L terjadi pada semua jenis belanja baik belanja pegawai, belanja barang, belanja modal dan belanja bantuan sosial. Disamping itu belanja transfer yang mengalami kenaikan adalah transfer DAU dan DID, seperti terlihat pada Tabel II.1 di atas.

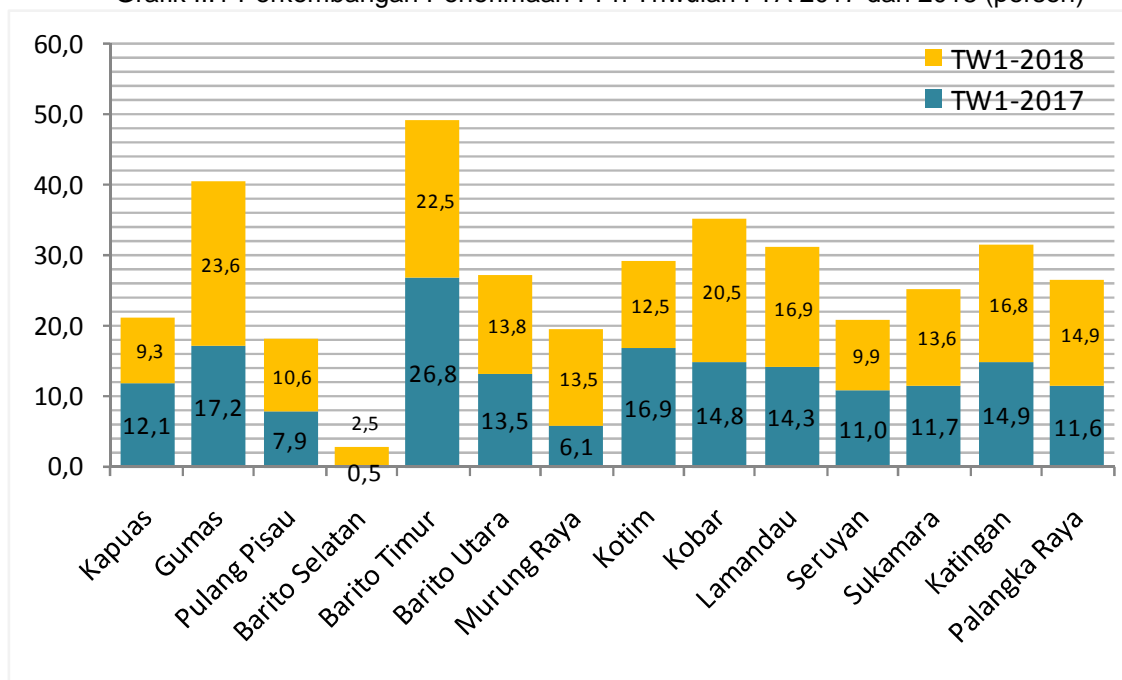
## 1. Penerimaan Perpajakan

### a) Pajak Penghasilan (PPH)

Target penerimaan PPh tahun 2018 sebesar Rp3,14 triliun atau naik 2,0 persen dari 2017 sebesar Rp3,08 triliun. Pada triwulan I-2018 sebesar 14,9 persen atau sebesar Rp466,7 miliar lebih baik dari capaian tahun 2017 sebesar 13,6 persen atau Rp418,6 miliar.

Capaian penerimaan PPh tertinggi adalah Pemda Kab. Gunung Mas sebesar 23,6 persen diikuti Kab. Kobar dengan 20,5 persen. Sedangkan pemda dengan capaian PPh terendah adalah Kab. Barito Selatan yang baru mencapai sebesar 2,5 persen dan Kab. Kapuas 9,3 persen. Dalam dua tahun terakhir Kab. Barsel merupakan pemda yang mempunyai capaian terendah PPh terendah sampai dengan triwulan I, seperti terlihat pada grafik II.1.

Grafik II.1 Perkembangan Penerimaan PPh Triwulan I TA 2017 dan 2018 (persen)



Sumber : OM SPAN dan Kanwil Pajak Kalselteng

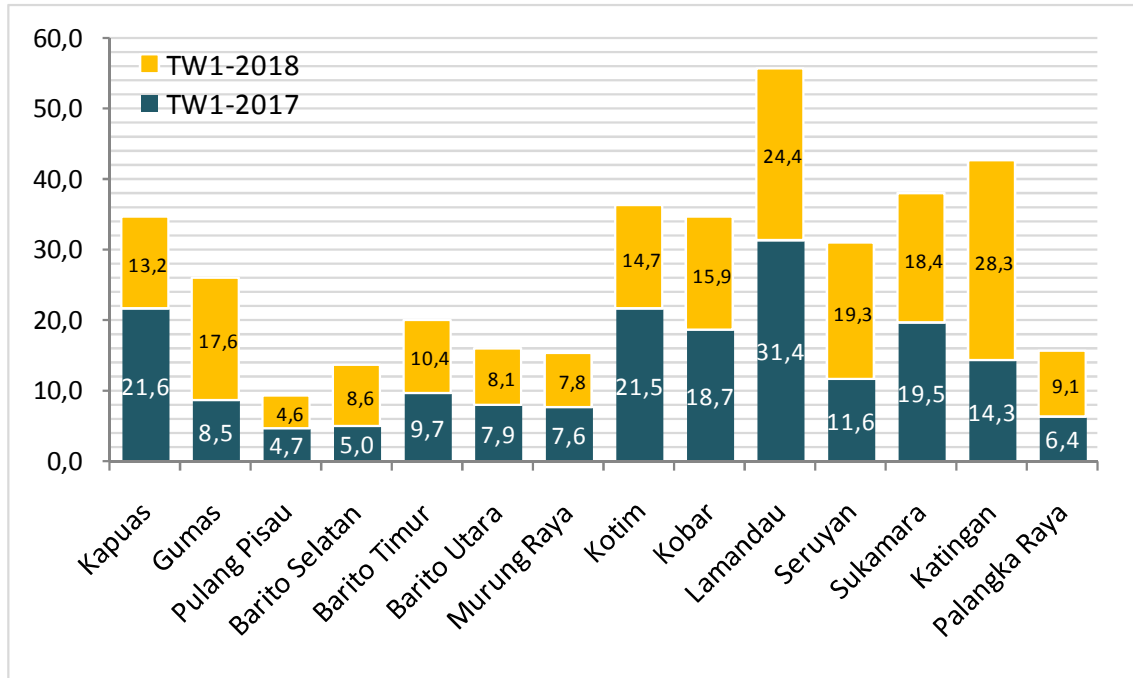
### b) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN adalah pajak yang pungut atas barang/jasa yang telah mengalami proses pabrikasi sehingga bertambah nilainya dari produk asalnya, dengan besaran tarif 10 persen. Adapun target penerimaan PPN tahun 2018 sebesar Rp2,35 miliar atau naik sebesar 3,0 persen 2017 sebesar Rp2,28 triliun. Realisasi pada triwulan I-2018 sebesar 13,9 persen atau Rp316,8 miliar mengalami perlambatan jika dibandingkan capaian tahun 2017 sebesar 14,6 persen atau Rp333,1 miliar.

Pemda dengan capaian PPN tertinggi adalah Kab. Katingan sebesar 28,3 persen diikuti Kab. Lamandau 24,4 persen. Pemda dengan perolehan PPN terendah dalam

dua tahun terakhir adalah Kab. Pulang Pisau pada angka 4,6 persen. Selengkapnya tersaji pada grafik II.2 di bawah ini.

Grafik II.2 Perkembangan Penerimaan PPN Triwulan I TA 2017 dan 2018 (persen)



Sumber : OM SPAN dan Kanwil Pajak Kalselteng

### c) Pajak Lainnya

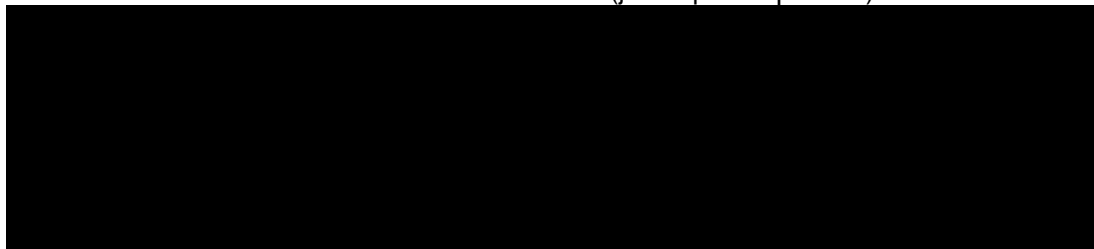
Kategori Pajak Lainnya menurut Kanwil Pajak Kalselteng adalah semua pajak di luar PPh dan PPN. Target penerimaan pajak lainnya tahun 2018 stagnan seperti tahun 2017 sebesar Rp54,7 miliar. Realisasi selama triwulan I 2018 sebesar Rp11,3 miliar atau 20,8 persen lebih baik dari tahun 2017 sebesar Rp9,07 miliar atau 16,6 persen. Realisasi tertinggi adalah Kab. Katawaringin Timur sebesar 23,0 persen dan Kab. Kotawaringin Barat 19,5 persen.

## 2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Target PNBP seluruh pemda se-Kalimantan Tengah 2018 sebesar Rp202,5 miliar lebih rendah dari 2017 sebesar Rp203,9 miliar. Capaian realisasi pada triwulan I-2018 sebesar Rp88,5 miliar atau 43,7 persen, lebih tinggi dari capaian Tw1-2017 sebesar Rp87,96 miliar atau 33,2 persen. Capaian lima besar jenis PNBP bervariasi. Peningkatan tertinggi terjadi pada jenis PNBP di lingkungan POLRI yaitu BPKB meningkat 36 persen dari periode yang sama tahun 2017. Pendapatan dari STKN pada 2018 turun 18,6 persen jika dibanding 2017. Capaian uang pendidikan turun 2,2 persen. PNBP bandar udara mengalami penurunan yang tajam sebesar 37,9 persen dari Rp13,6 miliar menjadi 8,43 miliar. Sedangkan perkembangan yang cukup baik terjadi pada penerimaan PNBP

layanan rumah sakit yang meningkat dari Rp3,6 miliar menjadi 4,3 miliar. Selengkapnya disajikan pada Tabel II.2.

Tabel II.2 Perkembangan Penerimaan Lima PNBP  
Triwulan I TA 2016-2018 (juta rupiah & persen)



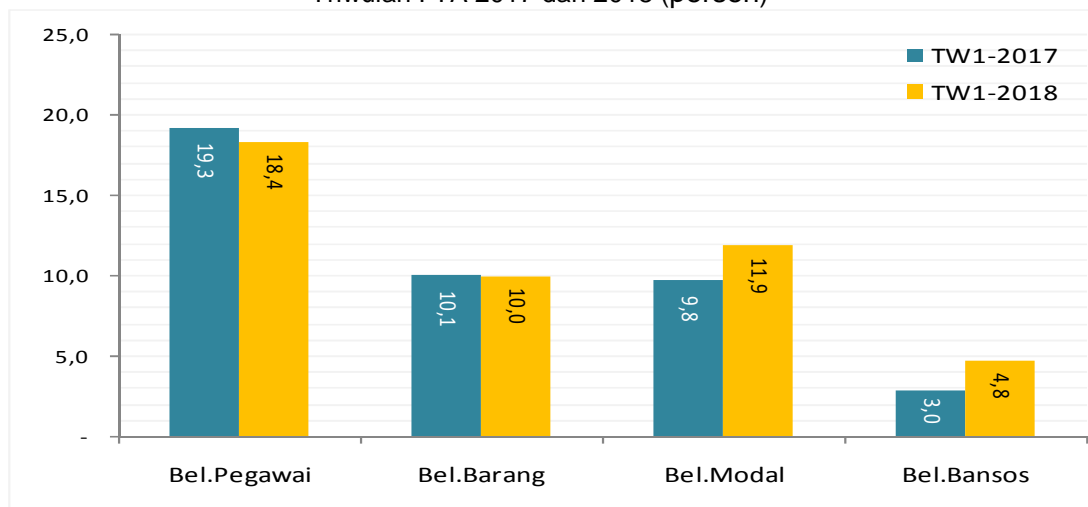
Sumber : OM SPAN Kemenkeu

## B. Belanja Negara

### 1. Belanja Pemerintah Pusat

Secara agregat realisasi belanja pemerintah pusat (pagu DIPA) di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah selama triwulan I-2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017.

Grafik II.3 Perkembangan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat  
Triwulan I TA 2017 dan 2018 (persen)



Sumber : Monev PA dan OM SPAN Kemenkeu

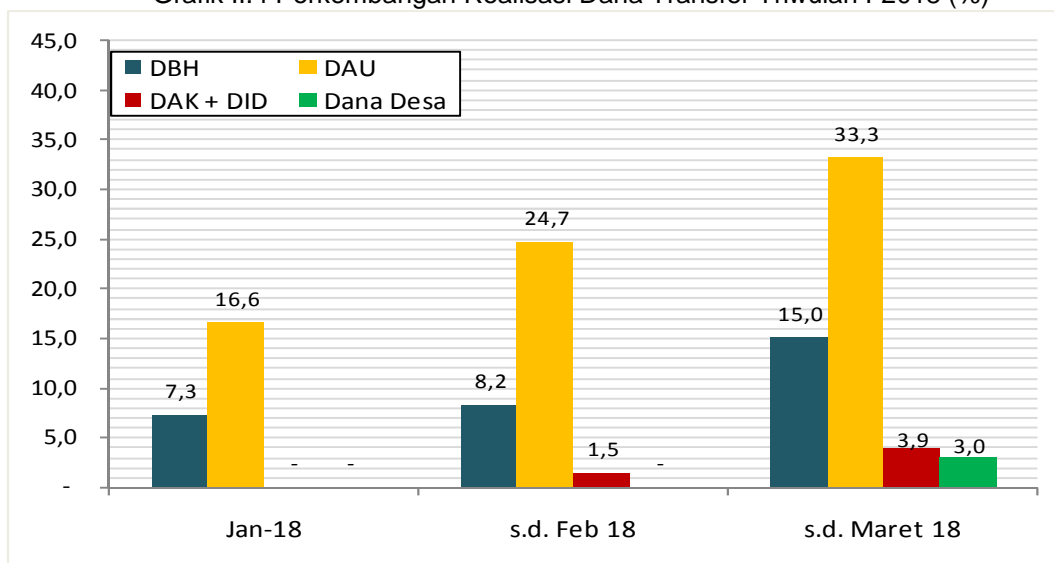
Sampai akhir Maret 2018 realisasi belanja K/L sebesar 13,1 persen atau Rp788,2 miliar, lebih baik dari tahun 2017 sebesar 12,9 persen atau sebesar Rp720,1 miliar. Capaian ini ditopang oleh peningkatan realisasi belanja modal dan belanja bansos. Sedangkan realisasi belanja pegawai menurun dari 19,3 persen menjadi 18,4 persen dan belanja barang stabil pada angka 10 persen. Selengkapnya tersaji pada Grafik II.3.

## 2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Secara agregat realisasi TKDD sampai dengan triwulan I-2018 sebesar 24,4 persen, lebih baik dari tahun lalu sebesar 23,1 persen. Realisasi DBH (pajak dan SDA) sampai triwulan I-2018 sebesar 15,0 persen atau Rp239,7 miliar lebih tinggi dari tahun 2017 sebesar 12,0 persen. Namun capaian 15,0 persen pada 2018 ini secara nominal jauh lebih kecil dari jumlah dana transfer tahun 2017 yang mencapai Rp513,3 miliar.

Perkembangan dana transfer setiap bulan dapat dijelaskan pada grafik II.4 di bawah ini. Transfer DAU mempunyai tren yang stabil setiap bulan, kecuali pada bulan Januari 2017. Selanjutnya, secara grafik terlihat *flat* per bulan dengan nilai 1/12 dari pagu dan akan berlaku sampai dengan akhir tahun anggaran.

Grafik II.4 Perkembangan Realisasi Dana Transfer Triwulan I-2018 (%)



Sumber : OM SPAN, Kemenkeu

Transfer DBH pada bulan Januari dan Maret sebesar 7 persen, namun pada Februari 2017 hanya sebesar 0,9 persen, sehingga total sampai dengan triwulan I-2018 sebesar 15,2 persen. Realisasi DAK selama triwulan I-2018 dicapai dari realisasi transfer DAK Non Fisik dengan agregat 3,9 persen. DAK Fisik belum ada realisasi sama sekali karena masih dalam tahap pemenuhan persyaratan teknis administratif. Realisasi dana desa tahap I baru dilakukan oleh dua pemda yaitu Kab. Seruyan dan Kab. Gunung Mas.

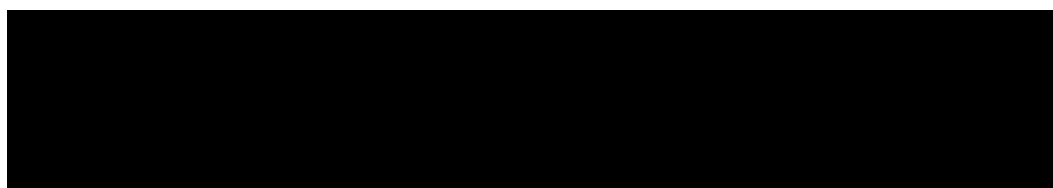
## C. Prognosis Realisasi APBN

Penyusunan prognosis realisasi APBN, baik prognosis pendapatan dan prognosis belanja tahun 2018 didasarkan data historis capaian tahun-tahun sebelumnya dan kebijakan pelaksanaan APBN yang berlaku saat ini. Realisasi penerimaan pajak tahun 2018 diprediksi lebih tinggi dari tahun 2017. Demikian juga belanja pemerintah tahun 2018 akan lebih baik dari 2017.



Penerimaan pajak sampai dengan semester I-2018 diprediksi 40 persen dan pada akhir tahun dapat mencapai lebih dari 86 persen. Hal ini didasarkan pada keberhasilan program *tax amnesty*, di mana basis data perpajakan semakin lengkap. Selain itu perpajakan akan meningkat seiring dengan angka pertumbuhan PDRB Kalimantan Tengah yang cukup tinggi setiap tahun. Lonjakan penerimaan pajak diprediksi akan terjadi pada triwulan III-2018.

Tabel II.3 Prognosis Realisasi APBN Prov. Kalteng s.d. Triwulan II-2018 (juta rupiah)



Sumber : OM SPAN, Simtrada dan Kanwil Pajak Kalselteng

Untuk prediksi estimasi belanja negara didasarkan pada data historis realisasi pengeluaran tahun-tahun sebelumnya. Sampai dengan semester I-2016 sebesar 43,3 persen dan semester I-2017 sebesar 48,6 persen, maka prediksi belanja sampai semester I-2018 sebesar 49,8 persen. Demikian juga data realisasi belanja sampai dengan akhir 2015 belanja sebesar 93,16 persen dan akhir 2016 sebesar 90,91 persen, maka belanja pemerintah tahun 2018 diprediksi sebesar 98,5 persen. Selengkapnya prediksi APBN sampai akhir semester I-2018 seperti Tabel II.3.

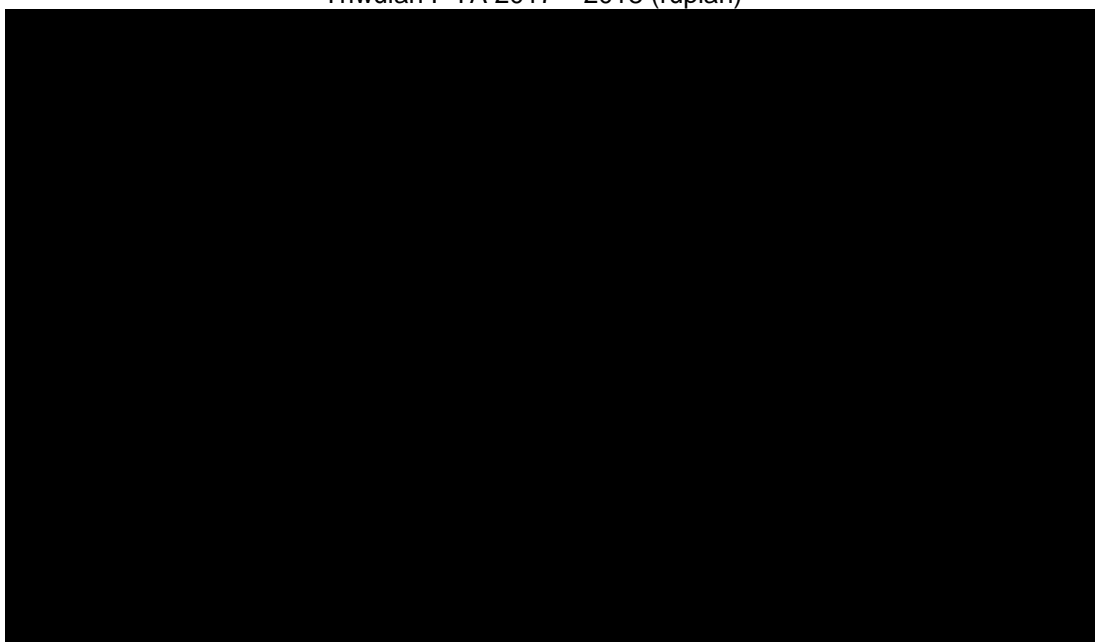
## BAB III PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan yang akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini.

### A. Pendapatan Daerah

Secara agregat pendapatan dalam struktur APBD dibagi atas tiga komponen utama yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Pendapatan Daerah APBD tahun 2018 tertuang seperti format pada tabel III.1 di bawah ini.

Tabel III.1 | Account Pendapatan APBD Pemda se-Provinsi Kalimantan Tengah  
Triwulan I TA 2017 – 2018 (rupiah)



Sumber : Gabungan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) APBD Pemda

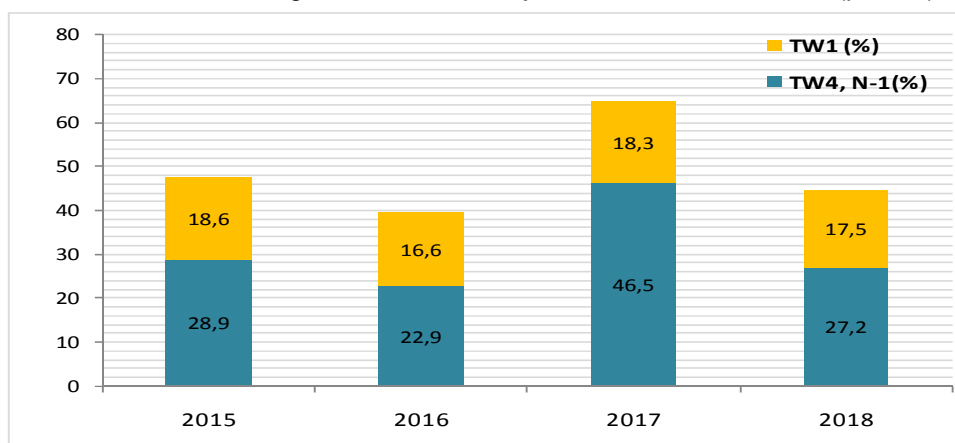
#### 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kontribusi PAD lingkup pemda di Provinsi Kalimantan Tengah terhadap total pendapatan daerah TA 2018 hanya sebesar 13,8 persen dari APBD atau Rp2.806,3 miliar. Rencana ini lebih baik dari tahun 2017 sebesar 12,6 persen atau Rp2.406,2 miliar. Realisasi selama triwulan I tahun 2018 mencapai 13,4 persen atau Rp375,2 miliar, lebih rendah dari tahun 2017 sebesar 16,0 persen atau Rp384,2 miliar. Hal ini disebabkan menurunnya penerimaan dari retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah.

##### a. Penerimaan Pajak Daerah

Sampai triwulan I-2018 realisasi pajak daerah 17,5 persen lebih rendah dari periode yang sama tahun 2017 sebesar 18,3 persen dan lebih rendah dari capaian triwulan IV tahun sebelumnya sebesar 27,2 persen seperti terlihat pada Grafik III.1.

Grafik III.1 Perbandingan Penerimaan Pajak Daerah antar Triwulan (persen)



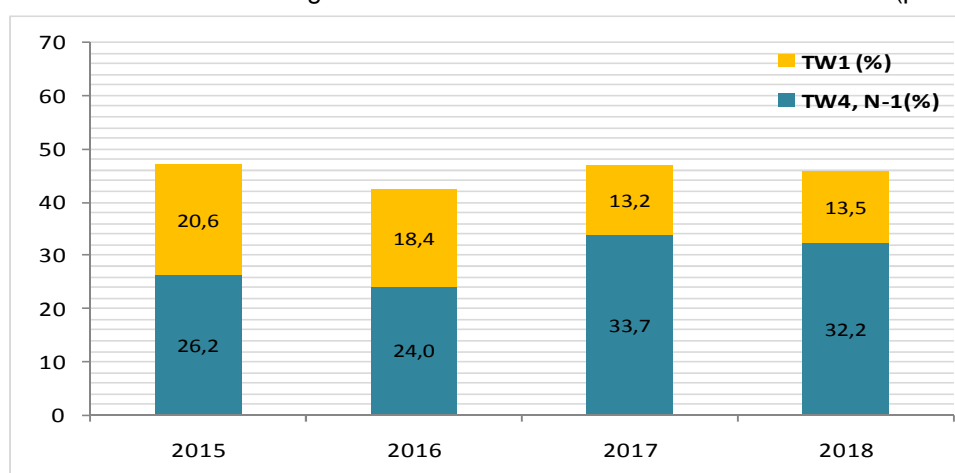
Sumber : Gabungan LRA APBD Pemda

Perlambatan penerimaan pajak daerah tidak lepas dari siklus pelaksanaan APBN dan APBD. Pada triwulan I realisasi belanja pemerintah masih rendah, maka aktivitas perekonomian masyarakat juga tidak sebanyak pada triwulan berikutnya. Sebagai contoh pajak restoran dan hotel pada triwulan I relatif kecil dan akan bertambah pada triwulan berikutnya sampai dengan akhir tahun anggaran.

#### b. Penerimaan Retribusi Daerah

Penerimaan TW1-2018 sebesar 13,5 persen mengalami peningkatan dibanding triwulan I-2017 sebesar 13,2 persen, namun masih lebih rendah dari capaian triwulan IV-2017 sebesar 23,2 persen.

Grafik III.2 Perbandingan Penerimaan Retribusi Daerah antar Triwulan (persen)



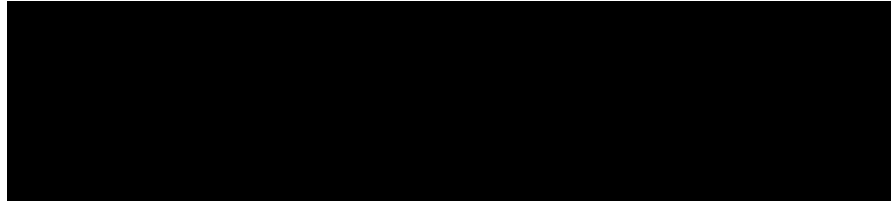
Sumber : Gabungan LRA APBD Pemda

Pada triwulan I-2018, Pemda dengan capaian retribusi tertinggi adalah Kab. Gunung Mas sebesar 21,5 persen dan penerimaan retribusi terendah adalah Kab. Barito Timur sebesar 1,5 persen.

### c. Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (KDYD)

Penerimaan dari KDYD terutama berasal dari hasil keuntungan pada penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD. Sampai dengan triwulan I belum terdapat penerimaan. Biasanya realisasi pada triwulan II atau triwulan III. Selengkapnya terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel III.2 Perkembangan Penerimaan KDYD (persen)

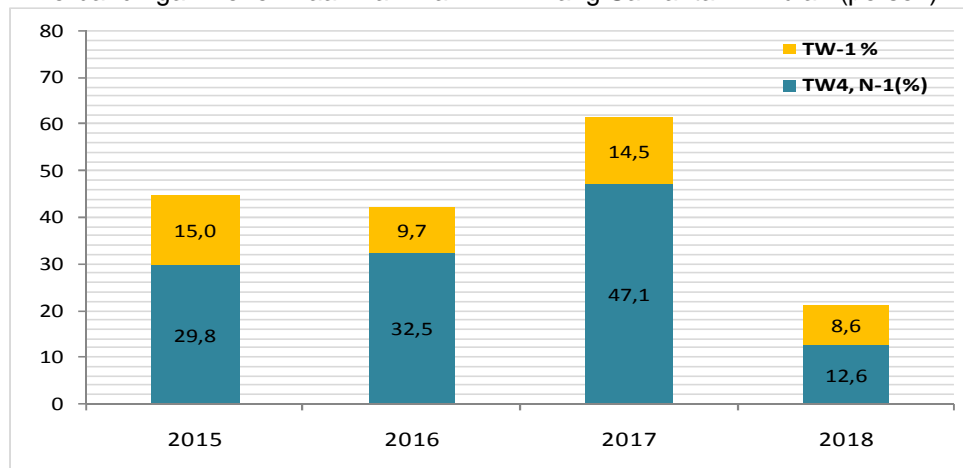


Sumber : Gabungan LRA APBD Pemda

### d. Lain-lain PAD Yang Sah

Realisasi penerimaan Lain-lain PAD yang sah pada triwulan I-2017 sebesar 8,6 persen lebih rendah dari capaian triwulan I tahun sebelumnya dan juga lebih rendah dari capaian triwulan IV-2017 sebesar 12,6 persen. Pola penerimaan ini erat kaitannya siklus realisasi APBD, lambat di awal tahun dan semakin besar pada akhir tahun.

Grafik III.3  
Perbandingan Penerimaan Lain-Lain PAD Yang Sah antar Triwulan (persen)

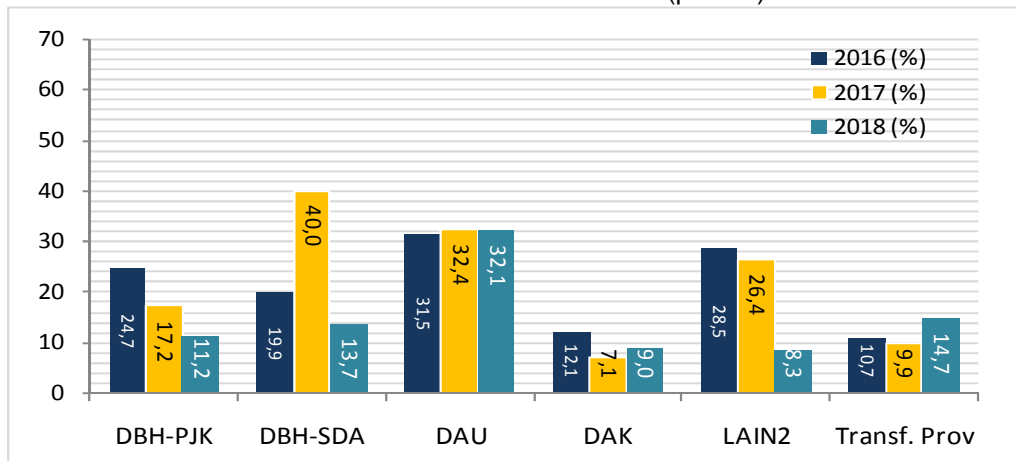


Sumber : Gabungan LRA APBD Pemda

## 2. Pendapatan Transfer

Realisasi penerimaan total dana transfer pada triwulan I-2017 mencapai 23,5 persen, lebih rendah transfer triwulan I-2017 sebesar 32,4 persen. Penurunan terjadi pada transfer DBH pajak, DBH SDA dan dana transfer lainnya. Realisasi DBH Pajak triwulan I-2018 sebesar 11,2 persen menurun dari TW I-2017 sebesar 17,2. DBH SDA triwulan I-2018 sebesar 13,7 persen menurun dari tahun sebelumnya sebesar 40 persen. Realisasi DAK triwulan I-2018 meningkat sebesar 1,9 persen dari TW I-2017 sebesar 7,1 persen menjadi 9,0 persen seperti tergambar pada Grafik III.4.

Grafik III.4 Perkembangan Penerimaan Dana Transfer  
Triwulan I TA 2016 – 2018 (persen)



Sumber : Gabungan LRA APBD Pemda

## B. Belanja Daerah

Pada tahun 2018, belanja operasi seluruh pemda mencapai 63,2 persen, tahun 2017 sebesar 62,1 persen dari total belanja APBD atau naik 0,01 persen. Alokasi belanja modal sebesar naik dari 23,3 persen menjadi 23,9 persen, belanja tak terduga tetap sebesar 0,2 persen dan belanja transfer naik dari 9,6 persen menjadi 10,3 persen pada 2018.

Tabel III.3 I Account Belanja APBD Pemda se-Provinsi Kalimantan Tengah  
Triwulan I TA 2017 – 2018 (rupiah)

[The content of this table is obscured by a black box.]

Sumber : Gabungan LRA APBD Pemda

Secara agregat, realisasi belanja APBD pada triwulan I-2018 relatif lebih baik dengan capaian 11,5 persen dibanding 2017 hanya 10,4 persen. Peningkatan penyerapan ini disumbang oleh realisasi belanja operasi, belanja tak terduga dan belanja transfer ke kabupaten/kota/desa. Sedangkan belanja modal hanya sebesar 3,9 persen yang

mengalami penurunan dari 2017 sebesar 5,2 persen. Selengkapnya tersaji dalam tabel III.2 di atas.

Pada triwulan I-2018 realisasi penerimaan (penggunaan Silpa, pencairan dana cadangan dan penerimaan kembali pinjaman daerah) sebesar 10,3 persen, lebih besar dari realisasi tahun 2017 sebesar nol persen. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel III.4.

Tabel III.4 | Account Pembiayaan APBD Pemda se-Provinsi Kalimantan Tengah Triwulan I TA 2017 – 2018 (rupiah)

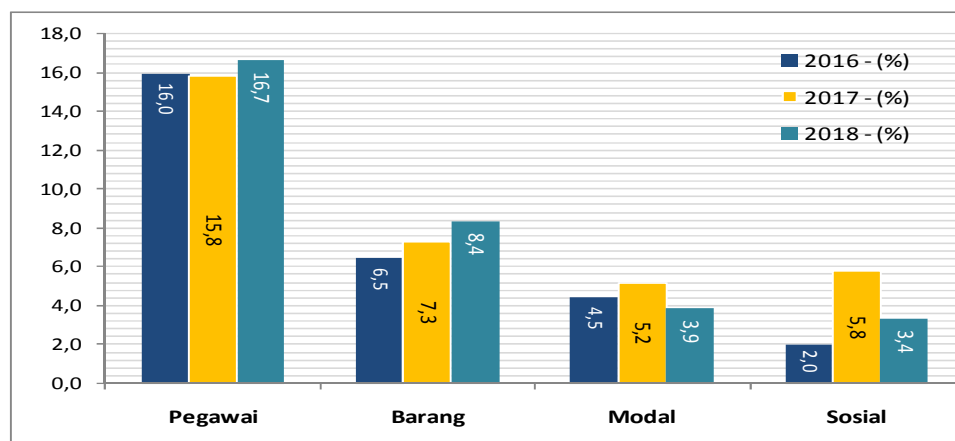
MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Total Se-Kalteng 2017			Total Se-Kalteng 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	1.159.947.659.267	0	0,0	1.328.225.338.514	136.166.189.984	10,3
Penggunaan SilPA	1.088.888.659.267	0	0,0	1.275.575.338.514	126.136.616.377	9,9
Pencairan Dana Cadangan	70.909.000.000	0	0,0	32.500.000.000	10.020.173.607	30,8
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0	0		150.000.000	9.400.000	6,3
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0	0		20.000.000.000	0	0,0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	360.481.780.263	31.653.799.996	8,8	106.009.987.627	25.734.399.998	24,3
Pembentukan Dana Cadangan	50.926.219.000	0		0	0	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	307.555.561.263	31.653.799.996	10,3	87.509.153.360	25.734.399.998	29,4
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	2.000.000.000	0		18.500.834.267	0	0,0
<b>PEMBLAYAAN NETTO</b>	799.465.879.004	-31.653.799.996	-4,0	1.222.215.350.887	110.431.789.986	9,0
<b>SilPA</b>	103.798.400.535	3.685.626.740.215		-4.124.661.707	2.130.529.902.037	

Sumber : Gabungan LRA APBD Pemda

### 1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Bansos

Pada triwulan I-2018 realisasi belanja pegawai 16,7 persen, belanja barang 8,4 persen lebih tinggi dari 2017 sebesar 7,3 persen. Realisasi belanja modal berjalan sangat lambat dari tahun ke tahun, belum ada terobosan penyerapan oleh pemda.

Grafik III.5 Realisasi Belanja APBD Triwulan I 2016-2018 (persen)



Sumber : Gabungan LRA APBD Pemda

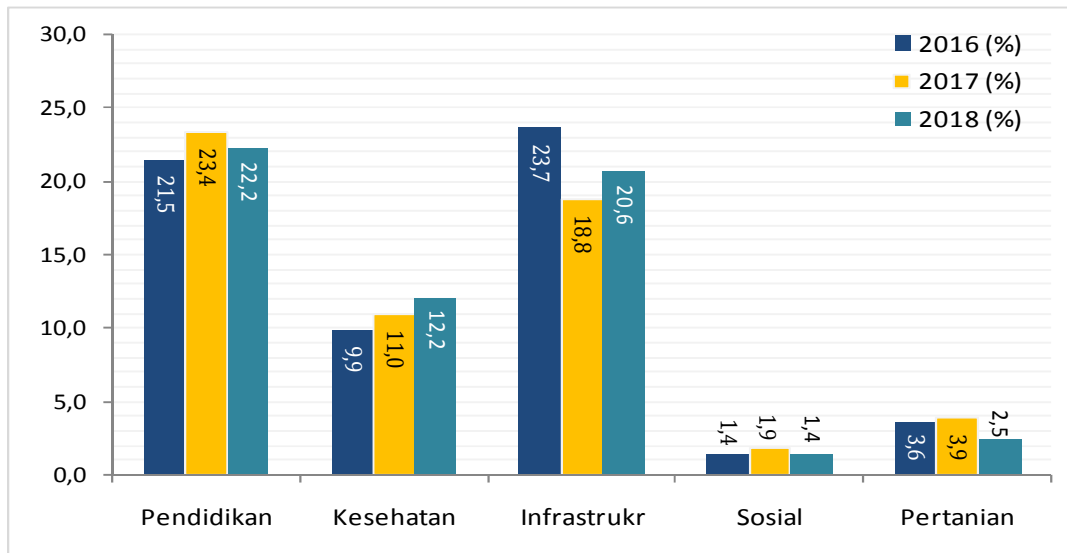
Kinerja belanja barang, belanja modal dan belanja bansos selama triwulan I belum optimal dan akan menimbulkan penumpukan penyerapan pada akhir tahun. Hanya realisasi belanja hibah tahun 2018 yang bergerak cepat mencapai 23,9 persen, meningkat dari tahun 2017 sebesar 15 persen. Hal ini karena adanya hibah untuk mendukung pemilukada serentak pada 2018. Capaian belanja APBD selengkapnya dapat dilihat dalam Grafik III.5.



## 2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Analisis belanja per urusan dilakukan terhadap pagu awal pada APBD TA 2016, TA 2017 dan TA 2018. Hal ini untuk mengetahui apakah alokasi belanja mandatori sudah bisa dilaksanakan oleh pemda. Alokasi belanja bidang pendidikan 20 persen dan bidang kesehatan 10 persen dan belanja infrastruktur diharapkan mencapai 25 persen.

Grafik III.6 Pagu Belanja APBD per-Urusan TA 2016-2018 (persen)



Sumber : Gabungan LRA APBD Pemda

Berdasarkan APBD tahun anggaran 2016-2018, belanja mandatori untuk bidang pendidikan sudah dialokasi di atas 20 persen. Belanja bidang kesehatan pada 2016 sebesar 9,9 persen, pada 2017 meningkat menjadi 11,0 persen dan pada 2018 mencapai 12,2 persen. Alokasi belanja infrastruktur tahun 2018 sebesar 20,6 persen, mengalami kenaikan 1,88 persen dibanding tahun 2017 sebesar 18,8 persen.

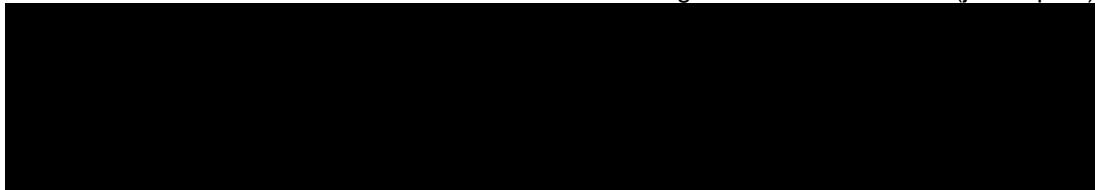
Terdapat pemda dengan alokasi belanja infrastruktur di atas 25 persen yaitu Kab. Seruyan (39 persen), Kota Palangkaraya (25,5 persen), Kab. Katingan (29 persen), Kab. Sukamara (28,9 persen), dan Kab. Gumus (26,1 persen). Sedangkan pemda dengan alokasi infrastruktur terendah adalah Kab. Murung Raya (9,3 persen).

## C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Semester I Tahun 2018

Prognosis pendapatan dan belanja APBD TA 2018 didasarkan realisasi historis tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data historis, realisasi pendapatan daerah sampai akhir semester I-2017 sebesar 52,8 persen dan 2017 sebesar 49,8 persen, maka prediksi pendapatan sampai dengan semester I-2018 sebesar 53,9 persen, yang didominasi oleh penerimaan dana transfer pusat. Sedangkan belanja daerah diprediksi sudah mencapai sebesar 50,4 persen sehingga terdapat surplus pada kas daerah, seperti Tabel III.5 di bawah ini.

Hal ini diasumsikan data tahun sebelumnya bahwa sampai dengan semester I-2016 sebesar 31,6 persen dan semester I-2017 sebesar 29,0 persen, maka sampai dengan akhir semester I-2018 sebesar 39,3 persen.

Tabel III.5  
Perkiraan Realisasi APBD Pemda Se-Prov. Kalteng s.d. Semester I-2018 (juta rupiah)



Sumber : Gabungan LRA APBD Pemda

Adapun prediksi sampai dengan akhir tahun 2018 pendapatan negara sebesar 97,0 persen dan pengeluaran/belanja mencapai 93,0 persen. Hal ini didasarkan pada capaian realisasi TA 2016, pendapatan *audited* sebesar 101,1 persen, pendapatan *unaudited* TA 2017 sebesar 94,4 persen. Sedangkan realisasi belanja daerah *audited* TA 2016 sebesar 94,4 persen dan *unaudited* TA 2017 sebesar 87,7 persen. Diperkirakan realisasi belanja *audited* 2017 akan bertambah, mengingat LRA yang dikirimkan kepada kami masih sangat tentatif yang belum dilakukan audit oleh BPK.

## BAB IV PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN

### A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN (LKPK)

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian triwulan I-2018, merupakan gabungan antara LKPP dengan LKPD periode triwulan I tahun 2018 dibandingkan dengan periode yang sama Tahun 2017. Menurut kaidah, transaksi yang bersifat resiprokal akan dieliminasi dari laporan konsolidasian.

Realisasibelanja transfer sebesar Rp4.055,3 miliar pada pemerintah pusat (LKPP) resiprokal dengan pendapatan transfer pada pemerintah daerah (LKPD), sehingga pendapatan transfer pada pemerintah daerah hanya Rp41,2 miliar. Adapun pendapatan dana transfer dianggap sebagai penerimaan pemerintah pusat Bagian Anggaran 999.05. Selengkapnya seperti terlihat pada Tabel IV.1.

Tabel IV.1 LRA Konsolidasian Tingkat Wilayah Prov. Kalteng 2017-2018 (juta rupiah)

Uraian	2018				2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	4.979.014,0	4.470.987,5	5.394.715,3	319,0%	1.287.470,9
Perpajakan	835.239,8	277.045,0	1.112.284,8	7,6%	1.033.706,6
PNBP	88.488,0	95.646,2	184.134,2	-27,0%	252.284,2
Hibah	-	1.816,2	1.816,2	22,7%	1.480,1
Transfer	4.055.286,2	4.096.480,1	4.096.480,1	-	-
Belanja Negara	4.843.457,6	2.246.501,8	3.034.673,2	14,1%	2.658.969,9
Belanja Pemerintah	788.171,4	2.190.310,0	2.978.481,4	12,0%	2.658.944,9
Transfer	4.055.286,2	56.191,8	56.191,8	2.246,7%	25,0
Surplus/(Defisit)	135.556,4	2.224.485,7	2.360.042,1	-272,1%	(1.371.499,0)
Pembiayaan	-	95.422,4	95.422,4	-401,5%	(31.653,8)
Penerimaan Pembiayaan	-	136.156,8	136.156,8	-	-
Pengeluaran Pembiayaan	-	40.734,4	40.734,4	28,7%	31.653,8
<b>SiLPA</b>	<b>135.556,4</b>	<b>2.319.908,1</b>	<b>2.455.464,5</b>	<b>-275,0%</b>	<b>(1.403.152,8)</b>

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Kalteng

### B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

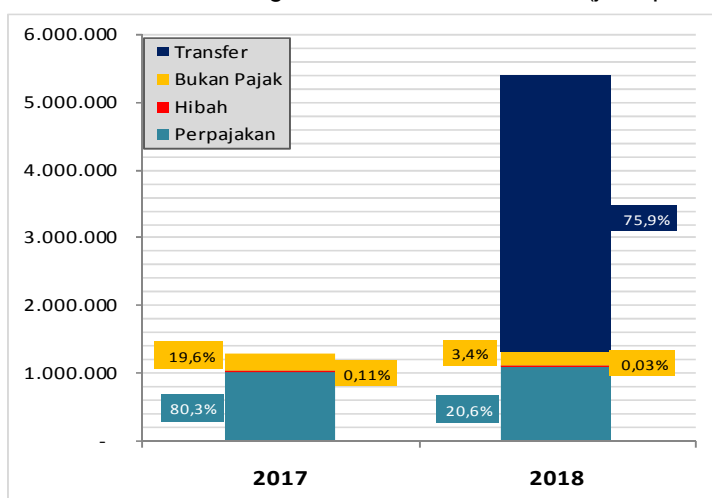
Total pendapatan negara konsolidasian periode triwulan I-2018 sebesar Rp5.394,7 miliar, mengalami peningkatan 319,0 persen dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.287,5 miliar. Peningkatan ini disebabkan adanya transaksi pendapatan dana transfer BA 999.05 yang mulai dicatat sebagai penerimaan negara.

Pendapatan perpajakan konsolidasian meningkat Rp78,6 miliar atau 7,6 persen, dengan 80,0 persen disumbangkan oleh kenaikan pendapatan pajak pusat. Sedangkan PNBP mengalami penurunan Rp65,2 miliar atau 27,0 persen. Belanja Hibah mengalami peningkatan 22,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang disumbang hanya bersumber dari belanja pemerintah daerah.

## 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pendapatan konsolidasian terdiri dari pendapatan pajak, PNBP, hibah dan transfer. Pada triwulan I-2018 terjadi peningkatan Rp78,6 miliar dengan kontribusi terhadap penerimaan konsolidasian sebesar 20,6 persen. Pendapatan transfer sebesar Rp4.096,5 miliar berkontribusi sebesar 75,9 persen dari keseluruhan pendapatan konsolidasian, dengan pendapatan dana transfer sebagai penyumbang utama.

Grafik IV.1 Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasi Prov. Kalimantan Tengah Triwulan I 2017-2018 (juta, persen)

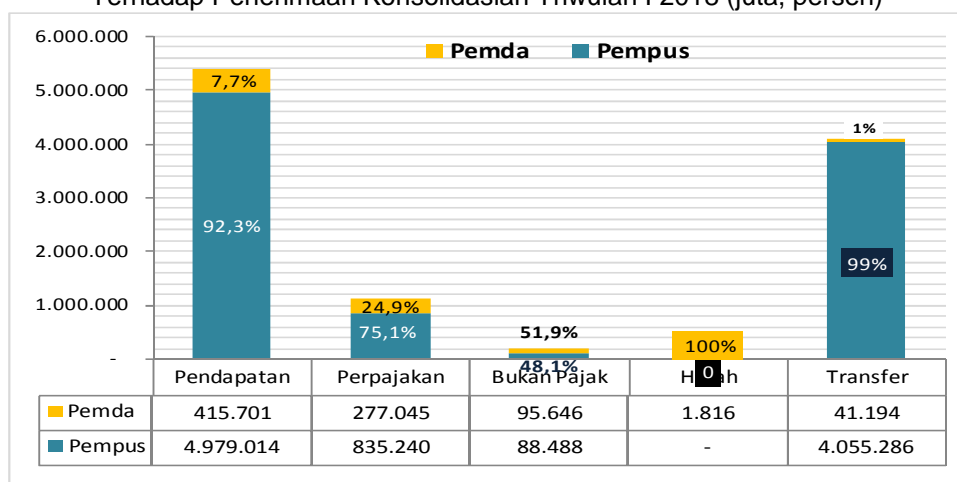


Secara nominal perolehan PNBP mengalami penurunan dari Rp252,3 miliar menjadi Rp184,1 miliar. Namun secara persentase terlihat jauh berkurang dari 19,6 persen menjadi 3,4 persen. Selengkapnya seperti pada Grafik IV.1.

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Kalteng

Pendapatan dana transfer merupakan transaksi yang disalurkan oleh KPPN Jakarta II sebagai mitra kerja satuan kerja Ditjen Perimbangan Keuangan untuk penyaluran DBH, DAU, DAK Non Fisik dan DID. Sekali lagi pendapatan ini baru dicatat pada tahun 2018, sehingga tidak ada pada 2017.

Grafik IV.2 Perbandingan Penerimaan Pusat dan Daerah Terhadap Penerimaan Konsolidasian Triwulan I 2018 (juta, persen)



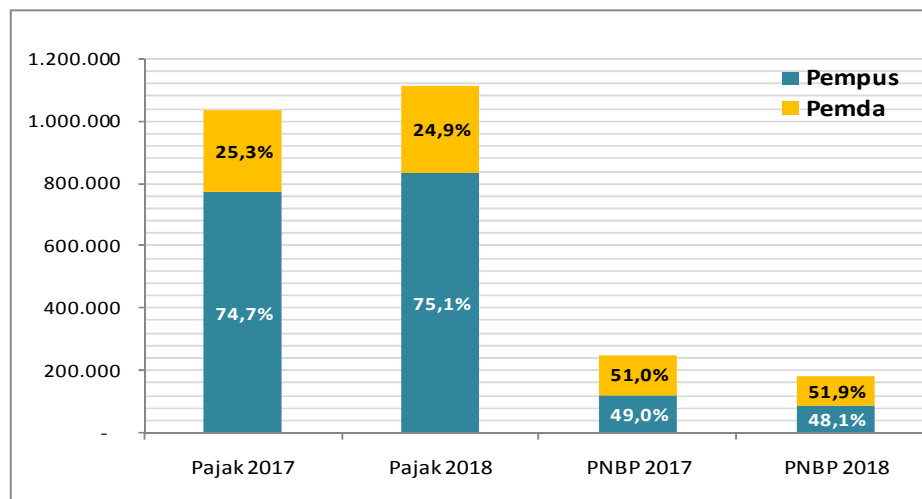
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Kalteng

Selain itu, jika dilakukan perbandingan kontribusi pendapatan pusat dan daerah, maka total pendapatan pusat jauh lebih besar dari pendapatan daerah, yaitu 92,3 persen berbanding 7,7 persen. Besarnya pendapatan pusat tersebut karena adanya dana transfer yang telah dibahas sebelumnya. Selengkapnya tergambar pada Grafik IV.2.

## 2. Analisis Perubahan

Total pendapatan perpajakan sampai triwulan I-2018 mengalami peningkatan. Peningkatan pajak pusat lebih tinggi dibandingkan pajak daerah. Pendapatan pajak dalam negeri sebesar Rp 57,5 miliar dan pajak perdagangan internasional sebesar Rp 5,8 miliar. Sedangkan penurunan pendapatan PNBPN konsolidasian sebesar Rp68,2 miliar, disebabkan oleh penurunan pendapatan PNBPN pusat sebesar Rp35,1 miliar dan PNBPN daerah sebesar Rp33,1 miliar. Dengan Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pendapatan pajak dan non pajak masih bisa dioptimalkan.

Grafik IV.3. Distribusi Pendapatan Pajak & PNBPN Triwulan I 2017-2018 (juta, persen)



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Kalteng

## 3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Pertumbuhan ekonomi triwulan I-2017 sebesar 8,49 persen (Y on Y). Pendapatan konsolidasian triwulan I-2017 hanya tumbuh sebesar Rp66,2 miliar atau sebesar 5,42 persen. Demikian juga pertumbuhan ekonomi triwulan I-2018 yang tumbuh 4,62 persen (Y to Y), tidak diimbangi dengan penerimaan pajak dan non pajak yang hanya tumbuh 0,8 persen. Angka yang sangat kecil di bawah potensi ekonomi masyarakat. Dalam kondisi seperti ini, pemungutan pajak dan non pajak belum efektif. Masih terdapat potensi yang cukup tinggi bagi pemerintah dan pemerintah daerah untuk memperoleh sumber pendapatan dari pajak dan non pajak dari perekonomian masyarakat. Masih memungkinkan untuk dilakukan instensifikasi dan ekstensifikasi

pengenaan pajak baik kenaikan tarif maupun perluasan jenis pajak dan non pajak. Selengkapnya disajikan dalam Tabel IV.2.

Tabel IV.2 Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pemda dan Pusat sampai dengan Triwulan I TA 2017-2018 (miliar rupiah)

Uraian	2017		2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	1.033,7	0,68%	1.112,3	7,6%
Pendapatan Bukan Pajak	252,3	30,59%	184,1	-27,0%
Total	1.286,0	5,42%	1.296,4	0,8%
PDRB/Pertumbuhan Ekonomi	31.041,9	9,49%	33.918,1	4,62%

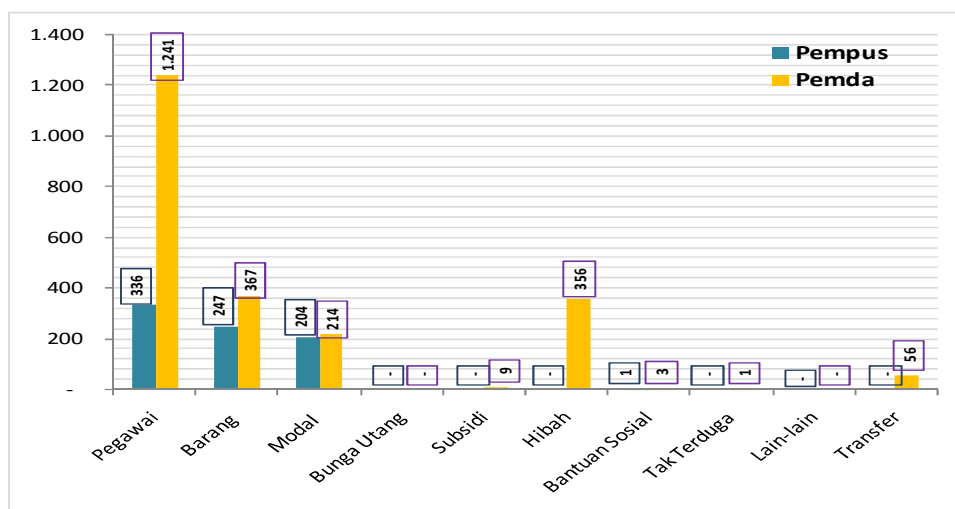
Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Kalteng

## C. BELANJA KONSOLIDASIAN

### 1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pada triwulan I-2018 total belanja negara konsolidasian berjumlah Rp3.034,7 miliar. Belanja pemerintah daerah menyumbang 74 persen, berbanding 26 persen belanja pemerintah pusat.

Grafik IV.4 Perbandingan Belanja & Transfer Pem. Pusat & Pemda Terhadap Belanja & Transfer Konsolidasian Prov. Kalteng Triwulan I-2018 (miliar rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Kalteng

Belanja pemerintah daerah di tiap jenis belanja juga lebih besar dibandingkan pusat. Hal tersebut disebabkan jumlah satuan organisasi perangkat daerah yang jumlahnya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah satuan kerja pemerintah pusat yang ada di Kalimantan Tengah.

### 2. Analisis Perubahan

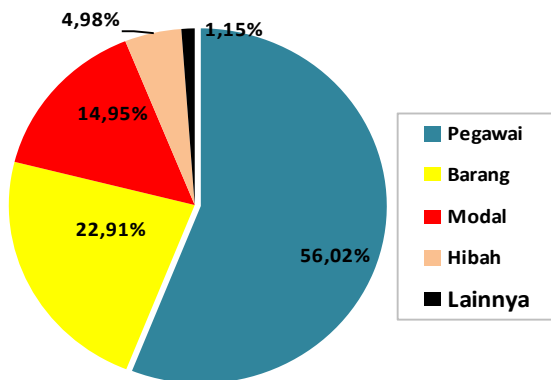
Total realisasi belanja negara konsolidasian di triwulan I-2018 sebesar Rp3.034,7 miliar lebih besar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp2.658,9 miliar. Sejalan dengan realisasi berdasarkan jenis belanja seluruhnya tercatat mengalami peningkatan, kecuali



belanja Bansos. Hal tersebut sangat disayangkan karena kurang sejalan dengan program pengentasan kemiskinan. Jenis belanja Hibah mengalami peningkatan persentase yang cukup tinggi, dari Rp132,3 miliar atau 4,98 persen di tahun lalu, menjadi Rp356,2 miliar atau 11,74 persen.

Realisasi jenis belanja negara konsolidasian terbesar di triwulan I-2018 adalah belanja Pegawai Rp1.576,6 miliar, lebih besar dibandingkan tahun lalu sebesar Rp1.489,6 miliar. Sedangkan jenis belanja dengan realisasi terkecil adalah belanja Tak Terduga, yang hanya Rp802 juta.

Grafik IV.5 Komposisi Belanja Konsolidasian Prov.Kalteng Triwulan I- 2017

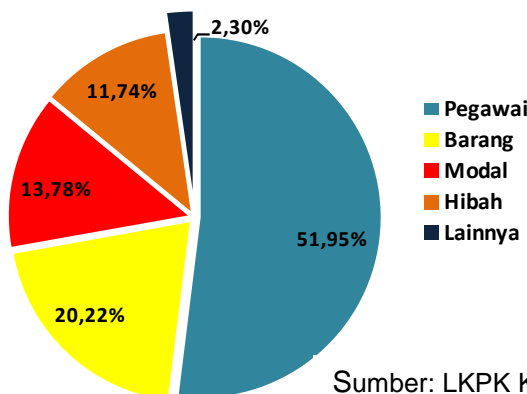


Realisasi terkecil adalah belanja Bansos, tercatat hanya Rp25 juta. Transfer DBH Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan Ke Desa dicatat sebagai Belanja Barang.

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Kalteng

Realisasi belanja Transfer konsolidasian meningkat menjadi Rp56,2 miliar. Transfer DBH Pajak Daerah dan Bantuan Keuangan ke Desa dicatat sebagai belanja Transfer.

Grafik IV.6 Komposisi Belanja Konsolidasian Prov. Kalimantan Tengah TW1-2018



Peningkatan hibah tercatat sebagai Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, berupa hibah dari pemda kepada Polri, Bawaslu dan KPU dalam rangka Pilkada serentak 2018.

Sumber: LKPK Kanwil DJPb Prov. Kalteng

### 3. Analisis Dampak Kebijakan Fiskal kepada Indikator Ekonomi Regional

Kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk mempengaruhi perekonomian. Arah dan tendensi kebijakan fiskal pemerintah tercermin dari alokasi anggaran (belanja). Alokasi anggaran yang tinggi menunjukkan *effort* yang kuat untuk mempengaruhi arah perekonomian seperti yang diharapkan.

Realisasi belanja pemerintah konsolidasian di triwulan I-2018 meningkat dari 2017, sebesar 14,1 persen turut mendukung tercapainya pertumbuhan perekonomian Kalteng 4,62 persen (y on y), namun di bawah target RPJMD TA 2018 sebesar 6,5 persen. Pertumbuhan realisasi belanja membawa dampak meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Tengah 2017 menjadi 69,79 dari sebelumnya 69,13 di tahun sebelumnya.

Tabel IV.3. Pengaruh Fiskal terhadap Indikator Ekonomi di Kalteng Triwulan I-2018

Belanja Pemerintah	2017	2018	%	+/- (%)	2018	2017	Indikator Kesejahteraan
Belanja Konsolidasian	2.658,9	3.034,7	14,1	4,62	33.918,1	32.786,2	Pertumbuhan Ekonomi
				0,95	69,79	69,13	IPM
				1,60	3,18	3,13	TPT

Sumber: LRA Konsolidasian, Bappedalitbang Prov.Kalteng dan BPS Prov.Kalteng

Namun demikian, kenaikan realisasi belanja belum mampu mengurangi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 3,13 persen pada Februari 2017 bertambah menjadi 3,18 persen pada Februari 2018. Diperlukan usaha dan kreatifitas program nyata agar belanja pemerintah menjadi salah satu lokomotif kesejahteraan masyarakat.

#### D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PDRB

Dalam perekonomian terbuka, secara matematis PDRB dapat dihitung dengan notasi  $Y = C + I + G + (X-M)$ , di mana Y : Pendapatan Nasional, C : Konsumsi Rumah Tangga, I : Investasi, G : Belanja Pemerintah, X : Ekspor dan M : Impor.

Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dihitung dari Belanja Pemerintah (G) dan Investasi (I) pada Laporan Operasional yang merupakan bagian dari GFS. Nilai Belanja Pemerintah diperoleh dari penjumlahan komponen belanja pegawai, barang dan jasa, konsumsi aset tetap dan manfaat sosial. Sedangkan nilai Investasi Pemerintah berupa nilai aset tetap. PDRB (ADHB) Triwulan I tahun 2018 yang berasal dari data BPS Prov. Kalteng, seperti dalam tabel IV.4 di bawah ini.

Tabel IV.4. Kontribusi Komponen Y, G dan I (juta rupiah) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kalteng Triwulan I-2018 (%)

Uraian Komponen	Tw I-2018	PDRB	Rasio
<b>Komponen G: Belanja Pemerintah</b>	<b>2.458.383,6</b>	33.918.125,5	7,25
- Kompensasi Pegawai	1.475.572,0		
- Penggunaan Barang & Jasa	613.749,1		
- Konsumsi Aset Tetap	-		
- Manfaat Sosial	369.062,5		
<b>Komponen I: Investasi/Nilai PMTB</b>	<b>418.295,5</b>		1,23
- Aset Tetap	418.295,5		

Dari Tabel IV.4 diperoleh informasi bahwa Belanja Pemerintah (G) berkontribusi 7,25 persen terhadap PDRB dan Investasi/PMTB berkontribusi 1,23 persen.

Sumber : GFS Kanwil DJPB & BPS Prov. Kalimantan Tengah

## BAB V RE-BUILDING APLIKASI SIKP

Pada tahun 2015 pemerintah meluncurkan program kredit dengan suku bunga rendah sebesar 9 persen dengan skema subsidi bunga kepada debitur melalui dana perbankan. Pada tahun 2018 suku bunga pinjaman diturunkan menjadi 7 persen. Subsidi bunga bervariasi sesuai jenis KUR yang disalurkan, yaitu 4,5 persen (ritel), 10,5 persen (mikro) dan 13,5 persen (TKI).

Untuk menjamin pemberian subsidi yang tepat sasaran dan tepat jumlah, pada tahun 2016, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP). SIKP adalah program aplikasi berbasis web yang dikembangkan untuk menampung data yang berkaitan dengan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang meliputi data calon debitur, data debitur, serta jumlah dan waktu penyaluran.

Pengguna Aplikasi SIKP ini meliputi Penyedia data calon debitur KUR (pemerintah daerah), Penyalur KUR (lembaga Keuangan bank dan non bank), Penjamin KUR (lembaga asuransi dan sejenisnya), KPA penyalur subsidi bunga KUR (Kementerian Koperasi dan UMKM), Pengawas Lembaga Penyalur KUR (Otoritas Jasa Keuangan/OJK), dan Komite Kebijakan Kredit Program (Kementerian Perekonomian), serta pihak yang ditentukan (Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan jajarannya).

Sejak diluncurkan, semua lembaga yang terkait dengan SIKP sudah proaktif memanfaatkan SIKP sesuai tugas dan fungsinya, kecuali pemerintah daerah yang sampai saat ini masih belum perhatian (*aware*). Hal ini terlihat dari data calon debitur yang diunggah oleh pemda yang masih sangat sedikit. Walaupun sudah ada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 581/6871/SJ tanggal 14 Desember 2015 tentang Kredit Usaha Rakyat Tahun 2015, yang antara lain terdapat kewajiban pemda untuk merekam data UMKM sebagai calon penerima KUR pada aplikasi SIKP. *User* dan *password* dan pelatihan juga sudah diberikan kepada operator pemda.

Dari hasil survey yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, wawancara dan pengamatan terjadi kekengangan pemda untuk menggunakan aplikasi SIKP dengan alasan sebagai berikut :

1. Pemda merasa tidak berkewajiban merekam data UMKM, karena KUR telah dikerjakan oleh perbankan;
2. Pemda menggunakan data UMKM versi Pemda, karena hasil laporan (output) dari SIKP belum sesuai dengan yang dibutuhkan pemda.
3. Perekaman data memerlukan sumber daya, sumber dana, peralatan/sarpras yang belum tentu tersedia;
4. Perekaman data UMKM merupakan kerja tambahan (ekstra) dan tumpang tindih dengan pekerjaan pendataan dan perekaman UMKM versi pemda.

Dari empat poin di atas dapat ditarik kesimpulan sementara, bahwa pemda belum memperoleh manfaat dari *output* yang dihasilkan oleh SIKP. Laporan SIKP bersifat umum dan tidak lengkap sehingga sulit untuk diolah sesuai dengan kebutuhan pemda (terutama pimpinan) antara lain :

1. Laporan UMKM calon debitur dan debitur per wilayah kecamatan dan/atau desa/kelurahan;
2. Laporan UMKM calon debitur dan debitur per jenis/bidang usaha;
3. Laporan UMKM calon debitur dan debitur baik perorangan maupun badan;
4. Laporan UMKM debitur yang sudah diberikan kredit yang berasal dari hasil unggahan pemda.

Untuk itu perlu dilakukan pengembangan SIKP dan penyediaan menu pencetakan laporan/output sesuai kebutuhan pemda (*report by custom*). Memang selama ini terdapat dualisme dalam penyediaan menu laporan. Terdapat pemda yang tidak menghendaki laporan yang dianggap sensitif (misalnya alamat dan nomor handphone calon debitur). Menurut informasi dari pengembang aplikasi, Pemda ini mengawatirkan kalau data UMKM disalahgunakan untuk kepentingan politik oleh pihak-pihak tertentu. Karena isu UMKM sangat seksi untuk dijadikan komoditas politik.

Selain itu, ada pemda yang menghendaki laporan detil, sesuai ijin usaha yang dikeluarkan pemda, karena itulah merupakan tugas dan fungsi pemda dalam melakukan kegiatan yang berkaitan dengan UMKM. Untuk permintaan laporan di luar aplikasi SIKP, pemda harus melakukan permintaan khusus (surat) kepada pengembang aplikasi agar kebutuhan laporan pemda dapat dipenuhi. Namun Pemda berkehendak agar menu laporan sudah tersedia, sehingga tidak terus-menerus melakukan permintaan apabila diminta laporan oleh pimpinan. Hal ini sangat merepotkan dan tidak bisa menyediakan laporan secara cepat dan akurat.

Dengan tulisan ini besar harapan pihak yang terkait dan pengembangan aplikasi SIKP dapat mewujudkan harapan pemda, khususnya di wilayah Kalimantan Tengah. Dengan demikian mereka akan menggunakan SIKP untuk mendukung pengembangan UMKM di daerah.

## LAMPIRAN I

### PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah) TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Provinsi Kalimantan Tengah 2017			Provinsi Kalimantan Tengah 2018		
	Pagu	Realisasi	%			%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	4.086.898,4	1.032.579,8	25,3	4.327.490,3	990.974,6	22,9
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	1.327.494,1	259.964,7	19,6	1.400.634,3	246.970,8	17,6
Pendapatan Pajak Daerah	1.088.380,0	211.992,5	19,5	1.125.627,3	202.612,2	18,0
Pendapatan Retribusi Daerah	9.935,0	1.810,7	18,2	12.194,4	1.781,0	14,6
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	50.204,0	0,0	0,0	63.320,0	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	178.975,1	46.161,5	25,8	199.492,6	42.577,6	21,3
<b>Pendapatan Transfer</b>	2.758.379,4	769.324,8	27,9	2.925.831,3	741.349,7	25,3
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	2.615.492,1	628.281,8	24,0	2.802.590,8	705.406,5	25,2
Dana Bagi Hasil Pajak	147.925,6	47.255,0	31,9	151.135,1	19.686,3	13,0
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	163.537,8	82.549,4	50,5	382.419,7	63.208,4	16,5
Dana Alokasi Umum	1.612.657,5	498.477,3	30,9	1.574.382,9	524.794,3	33,3
Dana Alokasi Khusus	691.371,1	0,0	0,0	694.653,2	97.717,5	14,1
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	139.457,4	141.043,0	101,1	119.810,5	35.943,1	30,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	139.457,4	141.043,0	101,1	119.810,5	35.943,1	30,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	3.430,0	0,0	0,0	3.430,0	0,0	0,0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	0,0	0,0	0,0	3.185,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan dr Prov	3.430,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	1.024,8	3.290,3	321,1	1.024,8	2.654,1	259,0
Pendapatan Hibah	1.024,8	1.091,0	106,5	1.024,8	1.769,7	172,7
Pendapatan Lainnya (al. DD)	0,0	2.199,4	0,0	0,0	884,3	0,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	3.348.055,3	325.852,4	9,7	3.982.833,4	434.380,6	10,9
<b>Belanja Operasi</b>	2.742.951,1	324.470,4	11,8	2.919.723,8	403.550,4	13,8
Belanja Pegawai	1.284.711,6	179.521,9	14,0	1.496.552,5	270.682,0	18,1
Belanja Barang	976.332,4	71.906,7	7,4	683.154,4	57.335,5	8,4
Bunga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subsidi	1.163,3	0,0	0,0	1.163,3	0,0	0,0
Hibah	437.578,1	73.041,8	16,7	707.662,7	75.532,9	10,7
Bantuan Sosial	43.165,6	0,0	0,0	31.190,8	0,0	0,0
Bantuan Keuangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Modal</b>	585.104,2	1.382,0	0,2	1.053.109,6	30.830,2	2,9
Belanja Tanah	1.170,6	0,0	0,0	1.781,2	0,0	0,0
Belanja Peralatan dan Mesin	117.226,0	552,8	0,5	155.470,3	14.029,0	9,0
Belanja Gedung dan Bangunan	119.963,5	778,1	0,6	274.510,5	6.705,9	2,4
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	317.636,3	43,8	0,0	577.311,8	9.919,9	1,7
Belanja Aset Tetap Lainnya	29.107,9	7,2	0,0	44.035,9	175,4	0,4
Belanja Aset Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	20.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	20.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	636.217,9	71.728,8	11,3	641.559,3	131.194,3	20,4
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	597.917,9	71.728,8	12,0	616.709,3	131.194,3	21,3
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	597.917,9	71.728,8	12,0	616.709,3	131.194,3	21,3
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	38.300,0	0,0	0,0	24.850,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	31.600,0	0,0	0,0	17.550,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	5.000,0	0,0	0,0	5.600,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	1.700,0	0,0	0,0	1.700,0	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	3.984.273,2	397.581,2	10,0	4.624.392,7	565.574,9	12,2
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	102.625,2	634.998,6	16,2	-296.902,4	425.399,6	-69,8
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	62.364,8	0,0	0,0	213.000,0	0,0	0,0
Penggunaan SiLPA	62.364,8	0,0	0,0	213.000,0	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	164.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	164.990,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-102.625,2	0,0	0,0	213.000,0	0,0	0,0
<b>SiLPA</b>	0,0	634.998,6	0,0	-83.902,4	425.399,6	-19,7

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kota Palangka Raya 2017			Kota Palangka Raya 2018		
	Pagu	Realisasi	%			%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.089.193,5	320.221,4	29,4	1.179.037,4	310.102,3	26,3
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	132.492,9	23.257,9	17,6	175.166,3	22.710,2	13,0
Pendapatan Pajak Daerah	93.430,0	17.943,4	19,2	99.789,5	19.023,0	19,1
Pendapatan Retribusi Daerah	15.612,0	3.260,1	20,9	15.612,0	2.616,6	16,8
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	2.500,0	0,0	0,0	2.500,0	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	20.950,9	2.054,5	9,8	57.264,8	1.070,6	1,9
<b>Pendapatan Transfer</b>	954.700,6	296.963,5	31,1	1.000.371,1	287.392,1	28,7
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	844.875,4	274.877,9	32,5	890.362,9	248.597,0	27,9
Dana Bagi Hasil Pajak	51.576,7	15.303,9	29,7	52.304,2	9.432,8	18,0
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dana Alokasi Umum	657.826,4	241.348,0	36,7	646.270,5	215.423,5	33,3
Dana Alokasi Khusus	135.472,3	18.226,0	13,5	191.788,2	23.740,8	12,4
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	109.825,2	22.085,6	20,1	110.008,2	38.795,1	35,3
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	109.825,2	22.085,6	20,1	110.008,2	38.795,1	35,3
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	2.000,0	0,0	0,0	3.500,0	0,0	0,0
Pendapatan Hibah	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.139.567,9	154.564,7	13,6	1.222.847,7	145.751,2	11,9
<b>Belanja Operasi</b>	868.872,9	142.329,5	16,4	940.605,7	139.650,6	14,8
Belanja Pegawai	565.033,0	117.699,6	20,8	635.593,1	96.405,4	15,2
Belanja Barang	265.180,9	22.000,2	8,3	246.809,6	16.271,8	6,6
Bunga	1.520,0	0,0	0,0	1.520,0	0,0	0,0
Subsidi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hibah	26.324,7	1.627,0	6,2	45.868,7	25.266,2	55,1
Bantuan Sosial	9.565,3	1.002,7	10,5	9.565,3	1.707,1	17,8
Bantuan Keuangan	1.249,0	0,0	0,0	1.249,0	0,0	0,0
<b>Belanja Modal</b>	269.695,0	12.203,6	4,5	278.242,0	6.100,6	2,2
Belanja Tanah	29.436,9	11.413,5	38,8	21.693,0	1.312,6	6,1
Belanja Peralatan dan Mesin	20.648,9	440,6	2,1	10.954,3	801,6	7,3
Belanja Gedung dan Bangunan	137.484,7	349,5	0,3	171.334,6	3.986,4	2,3
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	62.491,2	0,0	0,0	51.574,1	0,0	0,0
Belanja Aset Tetap Lainnya	19.053,3	0,0	0,0	22.402,5	0,0	0,0
Belanja Aset Lainnya	580,0	0,0	0,0	283,5	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	1.000,0	31,6	3,2	4.000,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	1.000,0	31,6	3,2	4.000,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	1.139.567,9	154.564,7	13,6	1.222.847,7	145.751,2	11,9
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-50.374,4	165.656,7	-30,4	-43.810,3	164.351,1	-26,7
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	71.967,6	0,0	0,0	55.653,5	10.020,2	18,0
Penggunaan SiLPA	71.967,6	0,0	0,0	45.653,5	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	10.000,0	10.020,2	100,2
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	21.843,2	0,0	0,0	11.843,2	5.300,0	44,8
Pembentukan Dana Cadangan	10.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.843,2	0,0	0,0	10.343,2	5.300,0	51,2
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	2.000,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	50.124,4	0,0	0,0	43.810,3	4.720,2	10,8
<b>SiLPA</b>	-250,0	165.656,7	-0,2	0,0	169.071,3	0,0



**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Kotawaringin Barat 2017			Kab. Kotawaringin Barat 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.311.782,2	306.812,7	23,4	1.289.644,4	301.067,4	23,3
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	154.892,2	21.871,9	14,1	185.457,4	24.828,9	13,4
Pendapatan Pajak Daerah	44.980,0	5.787,9	12,9	57.180,0	20.656,4	36,1
Pendapatan Retribusi Daerah	15.546,2	2.742,2	17,6	18.452,3	2.691,8	14,6
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	7.265,0	0,0	0,0	9.309,2	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	87.101,0	13.341,7	15,3	100.515,9	1.480,7	1,5
<b>Pendapatan Transfer</b>	1.140.085,0	282.373,1	24,8	1.052.478,0	275.658,5	26,2
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	953.269,0	255.059,4	26,8	898.156,9	252.837,2	28,2
Dana Bagi Hasil Pajak	46.284,4	4.779,6	10,3	43.055,1	3.734,8	8,7
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	21.792,9	7.614,7	34,9	25.926,4	4.678,1	18,0
Dana Alokasi Umum	662.249,3	220.749,8	33,3	652.906,9	217.635,6	33,3
Dana Alokasi Khusus	222.942,4	21.915,3	9,8	176.268,5	26.788,7	15,2
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	121.363,3	27.313,8	22,5	83.595,8	8.875,0	10,6
Dana Penyesuaian (al.DD)	121.363,3	27.313,8	22,5	83.595,8	8.875,0	10,6
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	65.452,7	0,0	0,0	70.725,4	13.946,3	19,7
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	65.452,7	0,0	0,0	70.725,4	13.946,3	19,7
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	16.805,0	2.567,7	15,3	51.708,9	580,0	1,1
Pendapatan Hibah	3.000,0	0,0	0,0	38.179,8	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	13.805,0	2.567,7	18,6	13.529,1	580,0	4,3
<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.300.165,5	110.410,9	8,5	1.180.801,3	106.289,1	9,0
<b>Belanja Operasi</b>	951.589,9	109.520,1	11,5	865.405,7	98.004,7	11,3
Belanja Pegawai	539.352,5	78.912,8	14,6	470.584,8	58.402,4	12,4
Belanja Barang	240.757,6	15.846,1	6,6	384.474,2	39.594,9	10,3
Bunga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subsidi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hibah	26.465,4	14.761,3	55,8	7.898,7	0,0	0,0
Bantuan Sosial	2.448,0	0,0	0,0	2.448,0	7,5	0,3
Bantuan Keuangan	142.566,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Modal</b>	343.162,0	882,5	0,3	312.895,6	8.284,4	2,6
Belanja Tanah	2.524,1	0,0	0,0	1.116,0	0,0	0,0
Belanja Peralatan dan Mesin	24.368,7	632,0	2,6	30.677,0	747,8	2,4
Belanja Gedung dan Bangunan	117.106,2	228,6	0,2	92.428,3	0,0	0,0
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	187.887,2	0,0	0,0	177.547,0	7.536,6	4,2
Belanja Aset Tetap Lainnya	1.301,0	0,9	0,1	725,9	0,0	0,0
Belanja Aset Lainnya	9.974,9	21,0	0,2	10.401,3	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	5.413,7	8,3	0,2	2.500,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	5.413,7	8,3	0,2	2.500,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	6.052,6	0,0	0,0	146.719,5	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	0,0	0,0		7.563,2	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	5.718,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	1.845,2	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	6.052,6	0,0		139.156,3	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0,0	0,0	0,0	139.156,3	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	6.052,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	1.306.218,1	110.410,9	8,5	1.327.520,8	106.289,1	8,0
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	5.564,1	196.401,8	2,8	-37.876,4	194.778,3	-19,4
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	4.435,9	0,0	0,0	48.188,0	0,0	0,0
Penggunaan SiLPA	4.435,9	0,0	0,0	28.188,0	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0	0,0	20.000,0	0,0	0,0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	10.000,0	5.992,0	59,9	10.311,6	0,0	0,0
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.000,0	5.992,0	59,9	10.311,6	0,0	0,0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	-5.564,1	-5.992,0	107,7	37.876,4	0,0	0,0
<b>SiLPA</b>	0,0	190.409,8	0,0	0,0	194.778,3	0,0

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Kotawaringin Timur 2017			Kab. Kotawaringin Timur 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.599.187,5	364.495,6	22,8	1.534.080,2	353.762,5	23,1
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	200.510,3	31.044,6	15,5	234.216,6	18.838,0	8,0
Pendapatan Pajak Daerah	43.099,2	12.490,8	29,0	55.000,0	12.194,7	22,2
Pendapatan Retribusi Daerah	12.547,7	1.671,4	13,3	15.198,7	2.180,5	14,3
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	4.238,4	0,0	0,0	4.391,5	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	140.625,1	16.882,5	12,0	159.626,4	4.462,8	2,8
<b>Pendapatan Transfer</b>	1.264.872,7	333.451,0	26,4	1.170.422,4	334.924,6	28,6
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	1.176.224,2	315.970,6	26,9	1.030.881,5	320.002,9	31,0
Dana Bagi Hasil Pajak	91.608,0	5.376,7	5,9	0,0	4.775,6	0,0
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.186,2	8.755,1	26,4	943,0	5.061,3	536,7
Dana Alokasi Umum	832.526,9	277.509,0	33,3	820.559,6	273.451,8	33,3
Dana Alokasi Khusus	218.903,1	24.329,8	11,1	209.378,9	36.714,1	17,5
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	7.500,0	7.500,0	100,0	34.750,0	0,0	0,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	7.500,0	7.500,0	100,0	34.750,0	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	81.148,5	9.980,4	12,3	104.790,9	14.921,7	14,2
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	81.148,5	9.980,4	12,3	104.790,9	14.921,7	14,2
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	133.804,5	0,0	0,0	129.441,1	0,0	0,0
Pendapatan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	133.804,5	0,0	0,0	129.441,1	0,0	0,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.424.279,9	138.594,0	9,7	1.531.114,4	135.821,6	8,9
<b>Belanja Operasi</b>	1.080.370,8	135.361,5	12,5	1.127.559,8	130.198,5	11,5
Belanja Pegawai	589.086,2	81.602,0	13,9	576.138,6	82.741,8	14,4
Belanja Barang	455.753,2	52.124,6	11,4	499.764,1	45.507,7	9,1
Bunga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subsidi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hibah	27.527,7	1.495,0	5,4	40.717,5	1.788,9	4,4
Bantuan Sosial	8.003,8	140,0	1,7	10.939,6	160,0	1,5
Bantuan Keuangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Modal</b>	342.909,1	3.232,5	0,9	402.554,7	4.835,9	1,2
Belanja Tanah	26.881,3	1.870,7	7,0	8.204,1	65,6	0,8
Belanja Peralatan dan Mesin	31.354,6	1.164,4	3,7	46.862,1	1.970,5	4,2
Belanja Gedung dan Bangunan	126.123,7	197,3	0,2	194.490,6	794,2	0,4
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	157.549,8	0,0	0,0	150.540,7	1.865,7	1,2
Belanja Aset Tetap Lainnya	999,7	0,0	0,0	2.457,1	139,9	5,7
Belanja Aset Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	787,3	78,7
Belanja Tak Terduga	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	787,3	78,7
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	236.260,2	13.875,4	5,9	229.013,9	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	5.564,7	0,0	0,0	7.019,9	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	4.309,9	0,0	0,0	5.500,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	1.254,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0	0,0	1.519,9	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	230.695,5	13.875,4	6,0	221.994,1	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	245,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	229.536,6	13.875,4	6,0	220.835,2	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	913,9	0,0	0,0	913,9	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	1.660.540,0	152.469,4	9,2	1.760.128,4	135.821,6	7,7
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-61.352,5	212.026,2	-28,9	-226.048,2	217.940,9	-103,7
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	66.722,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penggunaan SiLPA	66.722,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	5.370,0	5.370,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.370,0	5.370,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	61.352,5	-5.370,0	-8,8	0,0	0,0	0,0
<b>SiLPA</b>	0,0	206.656,2	0,0	-226.048,2	217.940,9	-103,7

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kabupaten Barito selatan 2017			Kabupaten Barito selatan 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	922.004,4	225.336,9	24,4	996.697,8	222.486,7	22,3
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	55.609,5	4.394,3	7,9	72.421,7	10.779,9	14,9
Pendapatan Pajak Daerah	17.397,5	1.338,9	7,7	14.543,5	1.861,3	12,8
Pendapatan Retribusi Daerah	5.427,1	813,7	15,0	4.696,8	646,3	13,8
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	5.253,6	0,0	0,0	7.091,8	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	27.531,3	2.241,7	8,1	46.089,6	8.272,4	17,9
<b>Pendapatan Transfer</b>	864.133,1	220.942,5	25,6	902.451,9	211.706,7	23,5
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	771.920,7	204.577,3	26,5	796.899,4	207.211,2	26,0
Dana Bagi Hasil Pajak	25.771,2	4.744,0	18,4	54.038,4	8.954,3	16,6
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	33.868,7	8.925,3	26,4	0,0	0,0	0,0
Dana Alokasi Umum	583.667,7	190.908,0	32,7	576.041,3	192.013,8	33,3
Dana Alokasi Khusus	128.613,1	0,0	0,0	166.819,7	6.243,1	3,7
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	69.302,9	16.365,3	23,6	70.463,9	0,0	0,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	69.302,9	16.365,3	23,6	70.463,9	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	22.909,6	0,0	0,0	35.088,6	4.495,5	12,8
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	22.909,6	0,0	0,0	35.088,6	4.495,5	12,8
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	2.261,7	0,0	0,0	21.824,2	0,0	0,0
Pendapatan Hibah	500,0	0,0	0,0	20.085,8	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	1.761,7	0,0	0,0	1.738,4	0,0	0,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	940.043,9	105.740,7	11,2	918.883,7	108.358,0	11,8
<b>Belanja Operasi</b>	814.052,1	105.508,8	13,0	669.524,5	108.018,9	16,1
Belanja Pegawai	500.110,3	78.411,7	15,7	472.323,4	87.125,2	18,4
Belanja Barang	143.173,3	10.975,0	7,7	179.483,2	15.968,8	8,9
Bunga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subsidi	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Hibah	28.456,0	15.588,7	54,8	13.217,8	4.525,0	34,2
Bantuan Sosial	6.876,2	533,4	7,8	3.500,0	400,0	11,4
Bantuan Keuangan	134.436,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Modal</b>	124.991,8	231,9	0,2	248.359,2	339,1	0,1
Belanja Tanah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belanja Peralatan dan Mesin	11.389,7	211,9	1,9	0,0	0,0	0,0
Belanja Gedung dan Bangunan	20.698,5	20,0	0,1	0,0	0,0	0,0
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85.376,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belanja Aset Tetap Lainnya	7.287,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Belanja Aset Lainnya	240,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	2.282,5	0,0	0,0	136.514,7	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	2.282,5	0,0	0,0	1.924,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.739,7	0,0	0,0	1.924,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	542,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	0,0	0,0	0,0	134.590,7	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0,0	0,0	0,0	134.590,7	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	942.326,3	105.740,7	11,2	1.055.398,4	108.358,0	10,3
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-20.321,9	119.596,2	-17,0	-58.700,6	114.128,7	-51,4
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	15.189,8	0,0	0,0	64.278,6	0,0	0,0
Penggunaan SiLPA	15.189,8	0,0	0,0	64.278,6	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	5.878,0	0,0	0,0	5.578,0	578,0	10,4
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.878,0	0,0	0,0	5.578,0	578,0	10,4
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	9.311,8	0,0	0,0	58.700,6	-578,0	-1,0
<b>SiLPA</b>	-11.010,2	119.596,2	-9,2	0,0	113.550,7	0,0

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Barito Utara 2017			Kab. Barito Utara 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.020.864,3	181.033,7	17,7	1.024.471,9	161.640,1	15,8
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	67.000,0	3.078,4	4,6	95.232,8	6.364,1	6,7
Pendapatan Pajak Daerah	20.119,0	1.032,9	5,1	19.330,7	1.964,9	10,2
Pendapatan Retribusi Daerah	5.458,7	979,4	17,9	9.346,3	1.712,4	18,3
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	4.831,2	0,0	0,0	10.614,6	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	36.591,1	1.066,1	2,9	55.941,2	2.686,8	4,8
<b>Pendapatan Transfer</b>	953.864,3	177.955,3	18,7	929.239,1	155.275,2	16,7
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	833.911,4	177.955,3	21,3	784.139,5	155.275,2	19,8
Dana Bagi Hasil Pajak	43.338,7	2.834,3	6,5	43.259,2	1.916,5	4,4
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	115.405,5	36.263,3	31,4	98.218,7	16.940,2	17,2
Dana Alokasi Umum	569.672,9	138.857,8	24,4	559.665,6	136.418,5	24,4
Dana Alokasi Khusus	105.494,3	0,0	0,0	82.996,0	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	81.780,4	0,0	0,0	105.427,2	0,0	0,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	81.780,4	0,0	0,0	105.427,2	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	38.172,5	0,0	0,0	39.672,5	0,0	0,0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	38.172,5	0,0	0,0	38.172,5	0,0	0,0
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,8
Pendapatan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8	0,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	855.928,4	135.406,5	15,8	913.899,4	127.371,9	13,9
<b>Belanja Operasi</b>	562.691,9	99.672,5	17,7	670.500,3	126.358,0	18,8
Belanja Pegawai	393.389,9	82.188,1	20,9	407.293,9	66.546,5	16,3
Belanja Barang	148.702,1	11.524,4	7,8	215.497,5	20.706,5	9,6
Bunga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subsidi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hibah	19.700,0	5.960,0	30,3	46.708,9	39.105,0	83,7
Bantuan Sosial	900,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Modal</b>	292.736,4	35.734,0	12,2	241.399,0	1.013,9	0,4
Belanja Tanah	36.285,2	0,0	0,0	1.154,7	0,0	0,0
Belanja Peralatan dan Mesin	46.621,3	249,3	0,5	26.382,3	599,1	2,3
Belanja Gedung dan Bangunan	73.925,5	12,3	0,0	118.227,4	301,2	0,3
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	135.539,4	35.472,5	26,2	93.749,0	113,6	0,1
Belanja Aset Tetap Lainnya	365,0	0,0	0,0	1.885,7	0,0	0,0
Belanja Aset Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	500,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	500,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	121.947,1	0,0	0,0	136.309,3	200,0	0,1
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	121.947,1	0,0	0,0	136.309,3	200,0	0,1
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	745,0	0,0	0,0	620,0	200,0	32,3
Bantuan Keuangan ke Desa	120.702,1	0,0	0,0	134.589,3	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	500,0	0,0	0,0	1.100,0	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	977.875,5	135.406,5	13,8	1.050.208,7	127.571,9	12,1
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	42.988,9	45.627,2	94,2	-25.736,8	34.068,2	-75,5
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	181.961,4	0,0	0,0	295.609,9	0,0	0,0
Penggunaan SiLPA	121.052,4	0,0	0,0	295.609,9	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	60.909,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	5.246,4	5.242,8	99,9	5.246,4	5.246,4	100,0
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.246,4	5.242,8	99,9	5.246,4	5.246,4	100,0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	176.715,0	-5.242,8	-3,0	290.363,5	-5.246,4	-1,8
<b>SiLPA</b>	219.703,8	40.384,4	18,4	264.626,7	28.821,8	10,9

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Barito Timur 2017			Kab. Barito Timur 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	865.787,6	1.148.094,4	132,6	937.809,4	184.054,5	19,6
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	101.727,3	547,7	0,5	132.840,7	2.101,1	1,6
Pendapatan Pajak Daerah	48.404,7	0,0	0,0	59.824,9	1.033,7	1,7
Pendapatan Retribusi Daerah	19.150,6	78,5	0,4	30.158,2	556,6	1,8
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	7.154,7	0,0	0,0	8.512,4	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	27.017,4	469,3	1,7	34.345,2	510,8	1,5
<b>Pendapatan Transfer</b>	671.056,3	1.147.546,6	171,0	717.462,2	181.953,3	25,4
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	645.885,7	1.147.546,6	177,7	663.041,6	179.579,1	27,1
Dana Bagi Hasil Pajak	22.663,6	2.022,6	8,9	22.398,9	3.627,1	16,2
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	48.149,3	947.238,0	0,0	39.208,2	7.536,0	19,2
Dana Alokasi Umum	482.815,5	160.938,5	33,3	478.975,2	159.658,4	33,3
Dana Alokasi Khusus	92.257,3	37.347,5	40,5	122.459,4	8.757,6	7,2
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	0,0	0,0		27.750,0	0,0	0,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	0,0	0,0	0,0	27.750,0	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	25.170,6	0,0	0,0	26.670,6	2.374,2	8,9
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	25.170,6	0,0	0,0	25.170,6	2.374,2	9,4
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	93.004,0	0,0	0,0	87.506,5	0,0	0,0
Pendapatan Hibah	292,7	0,0	0,0	13.742,9	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	92.711,3	0,0	0,0	73.763,6	0,0	0,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	906.655,6	95.489,4	10,5	830.321,2	114.325,2	13,8
<b>Belanja Operasi</b>	734.318,6	95.389,8	13,0	684.938,4	114.077,1	16,7
Belanja Pegawai	428.573,8	86.195,3	20,1	432.073,8	89.814,4	20,8
Belanja Barang	125.533,3	8.980,5	7,2	175.089,7	14.290,5	8,2
Bunga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Subsidi	450,0	0,0	0,0	450,0	195,9	43,5
Hibah	36.829,6	214,1	0,6	74.324,9	9.776,3	13,2
Bantuan Sosial	2.500,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan	140.431,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Modal</b>	170.337,0	99,6	0,1	143.382,8	248,1	0,2
Belanja Tanah	4.287,5	0,0	0,0	2.625,1	0,0	0,0
Belanja Peralatan dan Mesin	11.722,4	99,6	0,8	28.367,2	167,4	0,6
Belanja Gedung dan Bangunan	18.568,0	0,0	0,0	17.148,8	0,0	0,0
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	135.370,6	0,0	0,0	94.081,2	80,6	0,1
Belanja Aset Tetap Lainnya	280,9	0,0	0,0	1.025,5	0,0	0,0
Belanja Aset Lainnya	107,6	0,0	0,0	135,0	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	2.000,0	0,0	0,0	2.000,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	6.755,5	0,0	0,0	144.821,2	14.981,6	10,3
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	6.755,5	0,0	0,0	6.755,5	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	4.840,5	0,0	0,0	4.840,5	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	1.915,1	0,0	0,0	1.915,1	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	0,0	0,0		138.065,7	14.981,6	10,9
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0,0	0,0	0,0	605,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	0,0	0,0	0,0	127.821,8	10.811,8	8,5
Bantuan Keuangan Lainnya	0,0	0,0	0,0	9.638,8	4.169,8	43,3
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	913.411,1	95.489,4	10,5	975.142,5	129.306,8	13,3
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-47.623,5	1.052.605,0	-4,5	-37.333,1	54.747,7	-68,2
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	37.347,5	0,0	0,0	37.333,1	0,0	0,0
Penggunaan SILPA	37.347,5	0,0	0,0	37.333,1	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	0,0	0,0		0,0	0,0	
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	37.347,5	0,0	0,0	37.333,1	0,0	0,0
<b>SILPA</b>	-10.276,1	1.052.605,0	-1,0	0,0	54.747,7	0,0

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Kapuas 2017			Kab. Kapuas 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.489.299,6	345.960,1	23,2	1.798.596,4	327.084,7	18,2
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	95.056,6	15.084,1	15,9	97.695,7	7.510,1	7,7
Pendapatan Pajak Daerah	15.933,5	4.031,5	25,3	19.303,5	4.218,9	21,9
Pendapatan Retribusi Daerah	6.517,3	1.302,5	20,0	5.795,5	966,5	16,7
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	3.935,0	0,0	0,0	6.650,0	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	68.670,8	9.750,1	14,2	65.946,7	2.324,8	3,5
<b>Pendapatan Transfer</b>	1.390.843,0	330.876,0	23,8	1.696.400,7	319.574,6	18,8
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	1.169.193,0	323.221,2	27,6	1.483.292,9	310.148,0	20,9
Dana Bagi Hasil Pajak	52.539,4	3.934,8	7,5	39.941,6	2.446,3	6,1
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	120.111,3	25.348,9	21,1	291.867,1	7.111,9	2,4
Dana Alokasi Umum	881.812,3	293.937,4	33,3	866.321,7	288.773,9	33,3
Dana Alokasi Khusus	114.730,0	0,0	0,0	285.162,4	11.815,9	4,1
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	166.874,0	0,0	0,0	159.989,8	0,0	0,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	166.874,0	0,0	0,0	159.989,8	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	54.776,0	7.654,8	14,0	53.118,0	9.426,5	17,7
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	54.776,0	7.654,8	14,0	53.118,0	9.426,5	17,7
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	3.400,0	0,0	0,0	4.500,0	0,0	0,0
Pendapatan Hibah	3.400,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	0,0	0,0		1.500,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.466.204,4	152.374,7	10,4	1.979.546,0	235.739,9	11,9
<b>Belanja Operasi</b>	1.050.963,2	123.431,8	11,7	1.501.447,3	202.443,9	13,5
Belanja Pegawai	636.329,2	97.208,7	15,3	626.106,2	132.644,3	21,2
Belanja Barang	380.597,3	21.587,0	5,7	529.494,5	44.893,2	8,5
Bunga	4.000,0	0,0	0,0	3.600,0	0,0	0,0
Subsidi	0,0	0,0		0,0	0,0	
Hibah	21.683,6	539,0	2,5	64.916,6	24.442,0	37,7
Bantuan Sosial	8.353,0	4.097,1	49,0	10.034,8	96,0	1,0
Bantuan Keuangan	0,0	0,0		267.295,2	368,4	0,1
<b>Belanja Modal</b>	411.241,3	28.943,0	7,0	475.098,7	33.296,0	7,0
Belanja Tanah	1.927,6	0,0	0,0	5.140,3	109,1	2,1
Belanja Peralatan dan Mesin	30.360,5	1.792,0	5,9	24.623,1	1.464,8	5,9
Belanja Gedung dan Bangunan	34.109,1	238,4	0,7	52.133,5	456,3	0,9
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	341.629,7	26.898,2	7,9	389.967,7	31.265,9	8,0
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.034,4	14,4	0,5	3.014,1	0,0	0,0
Belanja Aset Lainnya	180,0	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	4.000,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	4.000,0	0,0	0,0	3.000,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	273.541,5	0,0	0,0	2.335,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	2.084,1	0,0	0,0	2.335,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.428,9	0,0	0,0	1.735,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0		600,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	655,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	271.457,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0,0	0,0		0,0	0,0	
Bantuan Keuangan ke Desa	270.457,4	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bantuan Keuangan Lainnya	1.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	1.739.745,9	152.374,7	8,8	1.981.881,0	235.739,9	11,9
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-250.446,3	193.585,3	-129,4	-183.284,6	91.344,9	-200,7
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	196.008,7	0,0	0,0	144.719,6	9,4	0,0
Penggunaan SiLPA	196.008,7	0,0	0,0	144.719,6	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0		0,0	9,4	
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	41.703,6	1.569,0	3,8	4.259,0	1.500,0	35,2
Pembentukan Dana Cadangan	30.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.703,6	1.569,0	13,4	3.000,0	1.500,0	50,0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0		1.259,0	0,0	0,0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	154.305,1	-1.569,0	-1,0	140.460,6	-1.490,6	-1,1
<b>SiLPA</b>	-96.141,3	192.016,3	-50,1	-42.824,0	89.854,3	-47,7

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Murung Raya 2017			Kab. Murung Raya 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.184.480,3	305.905,5	25,8	1.258.935,0	289.342,0	23,0
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	40.425,5	2.018,8	5,0	63.169,7	2.579,7	4,1
Pendapatan Pajak Daerah	5.038,5	875,4	17,4	5.888,0	1.537,7	26,1
Pendapatan Retribusi Daerah	3.237,0	349,2	10,8	2.849,2	323,1	11,3
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	4.700,0	0,0	0,0	6.100,0	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	27.450,0	794,2	2,9	48.332,5	718,9	1,5
<b>Pendapatan Transfer</b>	1.048.125,7	303.886,7	29,0	1.075.244,0	286.762,3	26,7
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	1.014.663,0	292.396,6	28,8	1.039.031,3	276.988,1	26,7
Dana Bagi Hasil Pajak	31.343,0	7.034,8	22,4	28.566,7	2.338,9	8,2
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	130.584,0	44.837,7	34,3	151.215,4	29.108,2	19,2
Dana Alokasi Umum	678.555,1	226.185,0	33,3	667.654,6	219.769,6	32,9
Dana Alokasi Khusus	174.180,9	14.339,0	8,2	191.594,7	25.771,5	13,5
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	7.500,0	7.500,0	100,0	8.750,0	4.375,0	50,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	7.500,0	7.500,0	100,0	8.750,0	4.375,0	50,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	25.962,6	3.990,1	15,4	27.462,6	5.399,2	19,7
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	25.962,6	3.990,1	15,4	25.962,6	5.399,2	20,8
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0		1.500,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	95.929,1	0,0	0,0	120.521,3	0,0	0,0
Pendapatan Hibah	0,0	0,0		18.345,1	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	95.929,1	0,0	0,0	102.176,2	0,0	0,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.083.497,1	90.750,1	8,4	1.126.101,8	128.289,8	11,4
<b>Belanja Operasi</b>	772.284,6	87.503,5	11,3	863.819,9	125.407,4	14,5
Belanja Pegawai	381.875,7	49.882,9	13,1	487.822,3	65.802,3	13,5
Belanja Barang	277.073,4	26.608,8	9,6	229.366,1	18.376,6	8,0
Bunga	0,0	0,0		0,0	0,0	
Subsidi	19.830,0	7.650,1	38,6	21.552,0	8.280,7	38,4
Hibah	86.158,3	3.336,6	3,9	118.621,7	32.892,8	27,7
Bantuan Sosial	7.347,2	25,2	0,3	6.457,8	55,0	0,9
Bantuan Keuangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Belanja Modal</b>	310.712,4	3.246,6	1,0	261.782,0	2.867,4	1,1
Belanja Tanah	11.355,2	1.618,7	14,3	4.471,4	0,0	0,0
Belanja Peralatan dan Mesin	29.481,8	1.178,8	4,0	26.588,2	2.172,0	8,2
Belanja Gedung dan Bangunan	90.928,4	376,3	0,4	67.500,1	541,7	0,8
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	174.169,4	53,6	0,0	161.828,2	153,8	0,1
Belanja Aset Tetap Lainnya	3.917,8	0,0	0,0	984,8	0,0	0,0
Belanja Aset Lainnya	859,9	19,3	2,2	409,2	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	500,0	0,0	0,0	500,0	15,0	3,0
Belanja Tak Terduga	500,0	0,0	0,0	500,0	15,0	3,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	160.206,7	0,0	0,0	189.035,1	200,0	0,1
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	0,0	0,0		873,7	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0		588,8	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0		284,9	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	160.206,7	0,0	0,0	188.161,4	200,0	0,1
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	445,0	0,0	0,0	445,0	200,0	44,9
Bantuan Keuangan ke Desa	158.965,2	0,0	0,0	186.919,8	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	796,5	0,0	0,0	796,5	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	1.243.703,8	90.750,1	7,3	1.315.136,9	128.489,8	9,8
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-59.223,5	215.155,5	-27,5	-56.201,9	160.852,1	-34,9
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	65.474,0	0,0	0,0	61.384,6	0,0	0,0
Penggunaan SiLPA	65.474,0	0,0	0,0	61.384,6	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0		0,0	0,0	
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	6.250,0	0,0	0,0	6.250,0	0,0	0,0
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	6.250,0	0,0		6.250,0	0,0	0,0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	59.224,0	0,0	0,0	55.134,6	0,0	0,0
<b>SiLPA</b>	0,5	215.155,5	0,0	-1.067,3	160.852,1	-0,7



**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Sukamara 2017			Kab. Sukamara 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	612.620,7	168.417,5	27,5	671.028,9	159.779,4	23,8
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	27.348,8	2.704,6	9,9	28.111,2	2.134,6	7,6
Pendapatan Pajak Daerah	4.195,4	763,0	18,2	4.258,4	1.178,1	27,7
Pendapatan Retribusi Daerah	10.871,9	1.409,2	13,0	1.963,3	402,2	20,5
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	6.792,3	0,0	0,0	8.574,9	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	5.489,2	532,4	9,7	13.314,7	554,3	4,2
<b>Pendapatan Transfer</b>	585.271,9	165.710,5	28,3	635.689,8	157.643,8	24,8
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	539.227,1	156.476,3	29,0	583.611,8	153.343,7	26,3
Dana Bagi Hasil Pajak	16.286,2	2.798,9	17,2	13.808,7	1.276,8	9,2
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	24.217,0	6.629,0	27,4	21.677,7	4.042,2	18,6
Dana Alokasi Umum	443.556,2	142.685,0	32,2	420.535,5	140.178,5	33,3
Dana Alokasi Khusus	55.167,7	4.363,5	7,9	127.589,9	7.846,1	6,1
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	33.868,8	7.500,0	22,1	28.277,2	0,0	0,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	33.868,8	7.500,0	22,1	28.277,2	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	12.175,9	1.734,2	14,2	23.800,8	4.300,1	18,1
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	12.175,9	1.734,2	14,2	22.300,8	4.300,1	19,3
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0		1.500,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	0,0	2,4		7.227,9	1,1	0,0
Pendapatan Hibah	0,0	0,0		7.177,9	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	0,0	2,4		50,0	1,1	2,1
<b>JUMLAH BELANJA</b>	571.165,9	63.334,3	11,1	618.504,6	69.907,9	11,3
<b>Belanja Operasi</b>	353.988,4	38.022,5	10,7	393.797,3	65.370,8	16,6
Belanja Pegawai	207.236,6	30.581,0	14,8	229.299,5	33.311,8	14,5
Belanja Barang	130.908,4	7.216,5	5,5	131.856,2	6.816,9	5,2
Bunga	0,0	0,0		0,0	0,0	
Subsidi	0,0	0,0		0,0	0,0	
Hibah	15.543,3	225,0	1,4	32.345,1	25.242,0	78,0
Bantuan Sosial	300,0	0,0	0,0	296,4	0,0	0,0
Bantuan Keuangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Belanja Modal</b>	216.177,5	25.311,8	11,7	223.707,3	4.537,1	2,0
Belanja Tanah	80,0	0,0	0,0	3.578,9	96,5	2,7
Belanja Peralatan dan Mesin	21.671,9	882,9	4,1	15.661,9	629,5	4,0
Belanja Gedung dan Bangunan	52.550,6	0,0	0,0	54.845,3	2.046,1	3,7
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	138.976,2	24.428,9	17,6	147.376,3	1.744,3	1,2
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.898,7	0,0	0,0	2.239,8	20,7	0,9
Belanja Aset Lainnya	0,0	0,0		5,0	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	76.872,0	0,0	0,0	75.524,3	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	1.650,0	0,0	0,0	699,6	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	450,0	0,0	0,0	476,6	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0		0,0	0,0	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	1.200,0	0,0	0,0	223,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	75.222,0	0,0	0,0	74.824,7	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	245,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	74.977,0	0,0	0,0	73.987,6	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	0,0	0,0		592,1	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	648.037,9	63.334,3	9,8	694.028,9	69.907,9	10,1
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-35.417,3	105.083,3	-33,7	-23.000,0	89.871,5	-25,6
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	36.500,0	0,0	0,0	30.000,0	0,0	0,0
Penggunaan SILPA	36.500,0	0,0	0,0	15.000,0	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0		15.000,0	0,0	0,0
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0		0,0	0,0	
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	14.500,0	0,0	0,0	7.000,0	3.500,0	50,0
Pembentukan Dana Cadangan	7.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.000,0	0,0	0,0	7.000,0	3.500,0	50,0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	22.000,0	0,0	0,0	23.000,0	-3.500,0	-15,2
<b>SILPA</b>	-13.417,3	105.083,3	-12,8	0,0	86.371,5	0,0



**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Pulang Pisau 2017			Kab. Pulang Pisau 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	900.039,6	250.303,7	27,8	1.045.534,5	225.235,6	21,5
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	36.000,0	2.648,6	7,4	45.600,3	2.729,9	6,0
Pendapatan Pajak Daerah	8.954,0	1.444,7	16,1	9.849,4	1.553,7	15,8
Pendapatan Retribusi Daerah	4.418,5	524,2	11,9	4.860,4	798,5	16,4
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	3.500,0	0,0	0,0	5.520,0	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	19.127,5	679,7	3,6	25.370,5	377,6	1,5
<b>Pendapatan Transfer</b>	860.109,0	247.655,1	28,8	977.720,7	222.505,7	22,8
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	716.960,8	219.792,1	30,7	816.969,1	200.505,7	24,5
Dana Bagi Hasil Pajak	14.211,7	2.730,9	19,2	12.711,7	1.592,8	12,5
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	22.481,7	6.034,9	26,8	22.369,4	4.138,8	18,5
Dana Alokasi Umum	576.640,3	192.213,4	33,3	568.390,4	189.463,5	33,3
Dana Alokasi Khusus	103.627,1	18.812,8	18,2	213.497,6	5.310,7	2,5
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	126.648,2	24.966,8	19,7	122.276,5	22.000,0	18,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	126.648,2	24.966,8	19,7	122.276,5	22.000,0	18,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	16.500,0	2.896,1	17,6	38.475,1	0,0	0,0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	16.500,0	2.896,1	17,6	38.475,1	0,0	0,0
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	3.930,6	0,0	0,0	22.213,5	0,0	0,0
Pendapatan Hibah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	3.930,6	0,0	0,0	22.213,5	0,0	0,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	858.125,0	94.064,4	11,0	1.017.063,4	88.106,7	8,7
<b>Belanja Operasi</b>	545.654,5	63.010,2	11,5	770.868,7	84.860,2	11,0
Belanja Pegawai	316.194,9	48.467,1	15,3	409.457,4	53.324,4	13,0
Belanja Barang	212.770,9	14.247,1	6,7	158.397,3	7.116,3	4,5
Bunga	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Subsidi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Hibah	15.862,7	296,0	1,9	61.304,2	23.858,9	38,9
Bantuan Sosial	826,0	0,0	0,0	370,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan	0,0	0,0	0,0	140.339,7	560,5	0,4
<b>Belanja Modal</b>	311.470,5	30.426,2	9,8	245.061,6	3.246,5	1,3
Belanja Tanah	0,0	0,0	0,0	229,0	79,9	34,9
Belanja Peralatan dan Mesin	18.861,1	114,8	0,6	13.847,9	287,8	2,1
Belanja Gedung dan Bangunan	107.434,3	30.311,4	28,2	34.696,7	510,8	1,5
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	182.587,6	0,0	0,0	193.718,7	2.368,1	1,2
Belanja Aset Tetap Lainnya	2.587,5	0,0	0,0	2.569,4	0,0	0,0
Belanja Aset Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	1.000,0	628,0	62,8	1.133,1	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	1.000,0	628,0	62,8	1.133,1	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	112.894,4	688,4	0,6	638,9	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	638,9	0,0	0,0	638,9	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	638,9	0,0	0,0	638,9	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	112.255,5	688,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	495,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	111.225,7	688,4	0,6	0,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	534,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	971.019,4	94.752,8	9,8	1.017.702,3	88.106,7	8,7
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-70.979,8	155.550,9	-45,6	27.832,1	137.128,8	20,3
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	28.775,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0	0,0
Penggunaan SiLPA	28.775,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	5.000,0	0,0	0,0	25.741,8	0,0	0,0
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	5.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0	0,0	15.741,8	0,0	0,0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	23.775,0	0,0	0,0	-17.241,8	0,0	0,0
<b>SiLPA</b>	-47.204,8	155.550,9	-30,3	10.590,3	137.128,8	7,7

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Gunung Mas 2017			Kab. Gunung Mas 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.043.180,6	238.399,5	22,9	1.170.839,4	259.300,4	22,1
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	38.613,9	2.705,7	7,0	38.613,9	5.015,8	13,0
Pendapatan Pajak Daerah	5.833,7	584,2	10,0	5.802,7	2.606,7	44,9
Pendapatan Retribusi Daerah	2.659,0	221,6	8,3	2.325,9	500,1	21,5
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	6.010,0	0,0	0,0	6.434,0	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	24.111,2	1.899,8	7,9	24.051,3	1.909,0	7,9
<b>Pendapatan Transfer</b>	913.918,4	235.693,8	25,8	1.026.343,3	236.843,1	23,1
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	891.187,3	233.198,3	26,2	984.862,1	224.158,3	22,8
Dana Bagi Hasil Pajak	24.156,0	4.427,5	18,3	22.070,7	1.646,4	7,5
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	78.266,5	25.370,1	32,4	77.320,1	6.806,1	8,8
Dana Alokasi Umum	564.860,1	188.286,7	33,3	600.000,0	186.632,9	31,1
Dana Alokasi Khusus	223.904,7	15.114,0	6,8	285.471,3	29.072,9	10,2
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	0,0	0,0		17.250,0	8.625,0	50,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	0,0	0,0	0,0	17.250,0	8.625,0	50,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	22.731,2	2.495,6	11,0	24.231,2	4.059,8	16,8
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	22.731,2	2.495,6	11,0	22.731,2	4.059,8	17,9
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	90.648,3	0,0	0,0	105.882,2	17.441,4	16,5
Pendapatan Hibah	0,0	0,0	0,0	18.675,2	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	90.648,3	0,0	0,0	87.207,0	17.441,4	20,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.072.253,4	83.128,5	7,8	1.016.818,3	146.679,2	14,4
<b>Belanja Operasi</b>	731.147,9	77.321,9	10,6	651.180,0	79.856,1	12,3
Belanja Pegawai	394.304,5	60.855,0	15,4	355.028,4	51.102,3	14,4
Belanja Barang	162.177,3	15.163,0	9,3	240.141,5	23.454,2	9,8
Bunga	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Subsidi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Hibah	50.402,2	1.303,9	2,6	53.915,5	5.299,6	9,8
Bantuan Sosial	1.099,4	0,0	0,0	2.094,6	0,0	0,0
Bantuan Keuangan	123.164,5	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Belanja Modal</b>	340.801,9	5.806,6	1,7	365.138,3	66.823,1	18,3
Belanja Tanah	1.059,3	0,0	0,0	525,9	0,0	0,0
Belanja Peralatan dan Mesin	48.509,3	1.987,9	4,1	27.737,0	5.586,2	20,1
Belanja Gedung dan Bangunan	58.271,2	347,1	0,6	62.081,4	11.300,5	18,2
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	228.630,7	3.251,5	1,4	272.066,5	49.936,3	18,4
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.331,5	220,1	5,1	2.727,5	0,0	0,0
Belanja Aset Lainnya	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Belanja Tak Terduga</b>	303,6	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	303,6	0,0	0,0	500,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	0,0	0,0		158.121,1	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	0,0	0,0		0,0	0,0	
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	0,0	0,0		158.121,1	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0,0	0,0	0,0	245,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	0,0	0,0	0,0	157.146,1	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	0,0	0,0	0,0	730,0	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	1.072.253,4	83.128,5	7,8	1.174.939,4	146.679,2	12,5
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-29.072,8	155.271,0	-18,7	-4.100,0	112.621,2	-3,6
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	62.150,0	0,0	0,0	10.150,0	0,0	0,0
Penggunaan SILPA	62.000,0	0,0	0,0	10.000,0	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0	0,0	150,0	0,0	0,0
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	48.544,4	0,0	0,0	6.050,0	0,0	0,0
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	48.544,4	0,0	0,0	6.050,0	0,0	0,0
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	13.605,6	0,0	0,0	4.100,0	0,0	0,0
<b>SILPA</b>	-15.467,2	155.271,0	-10,0	0,0	112.621,2	0,0

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Seruyan 2017			Kab. Seruyan 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.009.574,7	273.148,6	27,1	1.112.473,0	159.680,0	14,4
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	50.547,1	5.484,6	10,9	104.149,9	4.519,8	4,3
Pendapatan Pajak Daerah	19.064,9	712,0	3,7	52.602,1	753,6	1,4
Pendapatan Retribusi Daerah	7.667,8	1.046,4	13,6	10.397,9	1.700,4	16,4
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	6.081,7	0,0	0,0	6.081,7	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	17.732,6	3.726,1	21,0	35.068,1	2.065,7	5,9
<b>Pendapatan Transfer</b>	956.527,6	267.066,2	27,9	1.008.323,2	155.112,1	15,4
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	847.613,6	257.243,0	30,3	847.133,4	155.112,1	18,3
Dana Bagi Hasil Pajak	46.547,4	4.354,4	9,4	38.831,6	915,9	2,4
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	42.159,5	36.956,8	87,7	44.701,5	4.003,4	9,0
Dana Alokasi Umum	621.956,8	207.318,9	33,3	616.494,0	150.192,8	24,4
Dana Alokasi Khusus	136.949,8	8.612,8	6,3	147.106,2	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	7.500,0	7.500,0	100,0	54.083,4	0,0	0,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	7.500,0	7.500,0	100,0	54.083,4	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	101.414,0	2.323,2	2,3	107.106,4	0,0	0,0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	21.124,2	2.323,2	11,0	21.124,2	0,0	0,0
Bantuan Keuangan dr Prov	80.289,8	0,0	0,0	85.982,2	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	2.500,0	597,8	23,9	0,0	48,1	
Pendapatan Hibah	0,0	0,0		0,0	0,0	
Pendapatan Lainnya (al. DD)	2.500,0	597,8	23,9	0,0	48,1	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	930.158,5	105.906,6	11,4	1.008.793,8	33.227,7	3,3
<b>Belanja Operasi</b>	633.703,9	69.821,1	11,0	665.718,4	33.037,7	5,0
Belanja Pegawai	345.838,2	46.257,1	13,4	371.105,5	24.920,2	6,7
Belanja Barang	246.092,9	6.727,7	2,7	228.081,3	2.084,7	0,9
Bunga	15.636,3	15.636,3	100,0	0,0	0,0	
Subsidi	2.500,0	0,0	0,0	1.800,0	0,0	0,0
Hibah	23.211,5	1.200,0	5,2	60.576,0	6.032,8	10,0
Bantuan Sosial	425,0	0,0	0,0	4.155,6	0,0	0,0
Bantuan Keuangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Belanja Modal</b>	294.854,0	36.085,6	12,2	339.982,0	190,0	
Belanja Tanah	480,0	0,0	0,0	4.474,5	0,0	0,0
Belanja Peralatan dan Mesin	37.230,3	214,7	0,6	26.767,8	190,0	0,7
Belanja Gedung dan Bangunan	52.843,4	1.078,8	2,0	74.264,5	0,0	0,0
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	199.736,4	34.792,1	17,4	227.401,6	0,0	0,0
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.563,9	0,0	0,0	7.073,5	0,0	0,0
Belanja Aset Lainnya	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Belanja Tak Terduga</b>	1.600,5	0,0	0,0	3.093,4	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	1.600,5	0,0	0,0	3.093,4	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	146.470,4	0,0	0,0	164.057,8	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	2.700,0	0,0	0,0	6.300,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	2.700,0	0,0	0,0	6.300,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	0,0	0,0		0,0	0,0	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	143.770,4	0,0	0,0	157.757,8	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0,0	0,0		157.757,8	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	143.770,4	0,0		0,0	0,0	
Bantuan Keuangan Lainnya	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	1.076.628,9	105.906,6	9,8	1.172.851,5	33.227,7	2,8
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-67.054,2	167.241,9	-40,1	-60.378,5	126.452,3	-47,7
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	74.554,2	0,0	0,0	66.878,5	0,0	
Penggunaan SiLPA	74.554,2	0,0	0,0	66.878,5	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0		0,0	0,0	
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	7.500,0	0,0	0,0	6.500,0	0,0	
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.500,0	0,0		6.500,0	0,0	
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	67.054,2	0,0	0,0	60.378,5	0,0	
<b>SiLPA</b>	0,0	167.241,9	0,0	0,0	126.452,3	0,0

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kabupaten Lamandau 2017			Kabupaten Lamandau 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	759.311,4	192.879,2	25,4	815.385,1	174.205,0	21,4
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	32.585,1	5.062,5	15,5	79.909,3	8.589,8	10,7
Pendapatan Pajak Daerah	7.017,0	775,1	11,0	50.282,8	2.806,9	5,6
Pendapatan Retribusi Daerah	2.573,4	231,5	9,0	1.967,8	598,6	30,4
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	5.585,5	0,0	0,0	7.505,4	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	17.409,2	4.055,8	23,3	20.153,3	5.184,4	25,7
<b>Pendapatan Transfer</b>	724.621,3	187.816,7	25,9	734.660,2	165.615,3	22,5
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	623.440,7	178.350,3	28,6	616.654,8	161.171,9	26,1
Dana Bagi Hasil Pajak	23.794,1	3.235,3	13,6	41.777,9	1.460,8	3,5
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	30.869,6	11.094,0	35,9	12.805,1	5.628,3	44,0
Dana Alokasi Umum	466.344,7	155.448,2	33,3	462.248,6	154.082,9	33,3
Dana Alokasi Khusus	102.432,3	8.572,8	8,4	99.823,1	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	75.101,1	7.500,0	10,0	91.925,8	0,0	0,0
Dana Penyesuaian (al.DD)	75.101,1	7.500,0	10,0	91.925,8	0,0	0,0
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	26.079,6	1.966,4	7,5	26.079,6	4.443,3	17,0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	26.079,6	1.966,4	7,5	26.079,6	4.443,3	17,0
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	2.105,0	0,0	0,0	815,6	0,0	0,0
Pendapatan Hibah	2.105,0	0,0	0,0	665,6	0,0	0,0
Pendapatan Lainnya (al. DD)	0,0	0,0		150,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH BELANJA</b>	680.723,4	85.059,0	12,5	892.574,3	134.157,0	15,0
<b>Belanja Operasi</b>	517.586,6	61.316,2	11,8	734.096,6	120.625,9	16,4
Belanja Pegawai	246.944,1	42.138,7	17,1	336.544,1	50.385,4	15,0
Belanja Barang	227.302,9	11.813,8	5,2	165.699,6	9.978,5	6,0
Bunga	0,0	0,0		0,0	0,0	
Subsidi	0,0	0,0		0,0	0,0	
Hibah	41.409,6	7.363,7	17,8	108.486,3	57.910,3	53,4
Bantuan Sosial	1.930,0	0,0	0,0	2.113,3	48,4	2,3
Bantuan Keuangan	0,0	0,0		121.253,4	2.303,4	1,9
<b>Belanja Modal</b>	161.289,9	23.742,8	14,7	157.477,7	13.531,1	8,6
Belanja Tanah	3.592,7	0,0	0,0	3.499,8	0,0	0,0
Belanja Peralatan dan Mesin	14.718,4	899,5	6,1	13.946,5	264,9	1,9
Belanja Gedung dan Bangunan	52.827,5	1.624,7	3,1	50.416,1	1.209,7	2,4
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	84.469,6	21.105,2	25,0	87.030,0	11.943,3	13,7
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.681,7	113,3	2,0	2.585,5	113,3	4,4
Belanja Aset Lainnya	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Belanja Tak Terduga</b>	1.846,9	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	1.846,9	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	121.901,5	59,1	0,0	5.223,5	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	959,0	0,0	0,0	5.223,5	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	701,7	0,0	0,0	5.223,5	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	257,3	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	120.942,5	59,1	0,0	0,0	0,0	
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	245,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Bantuan Keuangan ke Desa	120.027,5	34,1	0,0	0,0	0,0	
Bantuan Keuangan Lainnya	670,0	25,0	3,7	0,0	0,0	
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	802.624,9	85.118,0	10,6	897.797,8	134.157,0	14,9
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-43.313,4	107.761,1	-40,2	-82.412,7	40.048,0	-205,8
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	135.830,5	0,0	0,0	166.392,9	0,0	0,0
Penggunaan SiLPA	125.830,5	0,0	0,0	158.892,9	0,0	0,0
Pencairan Dana Cadangan	10.000,0	0,0	0,0	7.500,0	0,0	0,0
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0		0,0	0,0	
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	14.656,2	5.480,0	37,4	9.480,0	4.860,0	51,3
Pembentukan Dana Cadangan	3.426,2	0,0	0,0	0,0	0,0	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	11.230,0	5.480,0	48,8	9.480,0	4.860,0	51,3
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	121.174,3	-5.480,0	-4,5	156.912,9	-4.860,0	-3,1
<b>SiLPA</b>	77.860,8	102.281,1	76,1	74.500,2	35.188,0	211,7

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Kab. Katingan 2017			Kab. Katingan 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	1.206.479,8	302.515,6	25,1	1.235.320,4	274.531,2	22,2
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	45.889,8	4.298,5	9,4	53.102,5	9.521,9	17,9
Pendapatan Pajak Daerah	6.454,5	1.614,5	25,0	9.554,5	3.525,9	36,9
Pendapatan Retribusi Daerah	5.764,7	432,6	7,5	3.952,7	1.413,9	35,8
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	4.143,1	0,0	0,0	7.741,6	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	29.527,4	2.251,5	7,6	31.853,8	4.582,2	14,4
<b>Pendapatan Transfer</b>	1.159.262,4	297.828,0	25,7	1.155.890,4	264.962,8	22,9
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	997.009,2	282.262,4	28,3	978.751,8	251.596,6	25,7
Dana Bagi Hasil Pajak	19.888,7	2.152,4	10,8	19.884,2	1.786,2	9,0
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	65.989,9	27.193,2	41,2	44.835,9	8.184,0	18,3
Dana Alokasi Umum	760.082,8	236.250,3	31,1	696.300,6	231.405,8	33,2
Dana Alokasi Khusus	151.047,8	16.666,5	11,0	217.731,2	10.220,6	4,7
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	126.733,2	7.500,0	5,9	140.118,6	8.625,0	6,2
Dana Penyesuaian (al.DD)	126.733,2	7.500,0	5,9	140.118,6	8.625,0	6,2
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	35.520,0	8.065,6	22,7	37.020,0	4.741,2	12,8
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	35.520,0	8.065,6	22,7	35.520,0	4.741,2	13,3
Bantuan Keuangan dr Prov	0,0	0,0		1.500,0	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	1.327,5	389,1	29,3	26.327,5	46,4	0,2
Pendapatan Hibah	1.327,5	389,1	29,3	26.327,5	46,4	0,2
Pendapatan Lainnya (al. DD)	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>JUMLAH BELANJA</b>	1.316.645,7	111.795,8	8,5	1.152.414,2	218.166,4	18,9
<b>Belanja Operasi</b>	871.460,2	80.315,8	9,2	730.755,5	192.238,6	26,3
Belanja Pegawai	443.120,3	65.746,2	14,8	375.676,9	121.965,2	32,5
Belanja Barang	185.055,0	8.833,9	4,8	303.840,2	46.862,9	15,4
Bunga	0,0	0,0		0,0	0,0	
Subsidi	2.000,0	247,6	12,4	2.000,0	309,7	15,5
Hibah	25.633,8	5.350,0	20,9	42.251,4	22.361,8	52,9
Bantuan Sosial	7.791,2	138,0	1,8	6.987,0	739,1	10,6
Bantuan Keuangan	207.859,9	0,0	0,0	0,0	0,0	
<b>Belanja Modal</b>	444.685,4	31.480,0	7,1	420.658,8	25.927,8	6,2
Belanja Tanah	1.090,0	0,0	0,0	1.920,0	0,0	0,0
Belanja Peralatan dan Mesin	15.852,4	643,4	4,1	27.488,3	233,8	0,9
Belanja Gedung dan Bangunan	38.242,9	99,2	0,3	28.601,6	0,0	0,0
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	384.823,2	30.730,4	8,0	359.969,2	25.691,7	7,1
Belanja Aset Tetap Lainnya	4.677,0	7,0	0,1	2.679,7	2,3	0,1
Belanja Aset Lainnya	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Belanja Tak Terduga</b>	500,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Belanja Tak Terduga	500,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	1.500,0	0,0	0,0	201.292,8	0,0	0,0
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	1.500,0	0,0	0,0	1.750,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	1.000,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	500,0	0,0	0,0	750,0	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	0,0	0,0		199.542,8	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	0,0	0,0		245,0	0,0	0,0
Bantuan Keuangan ke Desa	0,0	0,0		198.497,8	0,0	0,0
Bantuan Keuangan Lainnya	0,0	0,0		800,0	0,0	0,0
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	1.318.145,7	111.795,8	8,5	1.353.707,0	218.166,4	16,1
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-111.665,9	190.719,9	-58,5	-118.386,6	56.364,7	-210,0
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	120.665,9	0,0	0,0	126.136,6	126.136,6	100,0
Penggunaan SiLPA	120.665,9	0,0	0,0	126.136,6	126.136,6	100,0
Pencairan Dana Cadangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0		0,0	0,0	
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	9.000,0	8.000,0	88,9	7.750,0	4.750,0	61,3
Pembentukan Dana Cadangan	0,0	0,0		0,0	0,0	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	9.000,0	8.000,0	88,9	7.750,0	4.750,0	61,3
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	0,0	0,0		0,0	0,0	
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	111.665,9	-8.000,0	-7,2	118.386,6	121.386,6	102,5
<b>SiLPA</b>	0,0	182.719,9	0,0	0,0	177.751,3	0,0

**PAGU DAN REALISASI APBD (Juta rupiah)  
TRIWULAN I TA 2017 DAN TA 2018**

MATA ANGGARAN REALISASI TRIWULAN I	Total Se-Kalteng 2017			Total Se-Kalteng 2018		
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	19.100.704,6	5.656.104,2	29,6	20.397.344,1	4.393.246,3	21,5
<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	2.406.193,2	384.167,0	16,0	2.806.322,3	375.194,6	13,4
Pendapatan Pajak Daerah	1.428.301,9	261.386,7	18,3	1.588.837,3	277.527,6	17,5
Pendapatan Retribusi Daerah	127.387,0	16.873,3	13,2	139.771,2	18.888,5	13,5
Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah	122.194,6	0,0	0,0	160.347,0	0,0	0,0
Lain-Lain PAD Yang Sah	728.309,8	105.907,0	14,5	917.366,7	78.778,5	8,6
<b>Pendapatan Transfer</b>	16.245.770,9	5.265.089,9	32,4	17.008.528,3	3.997.279,8	23,5
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan:</b>	14.640.873,3	4.947.209,0	33,8	15.216.379,9	3.801.933,8	25,0
Dana Bagi Hasil Pajak	657.934,7	112.985,2	17,2	583.784,0	65.591,5	11,2
Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	930.619,9	1.274.810,6	137,0	1.213.508,3	166.446,9	13,7
Dana Alokasi Umum	10.395.224,7	3.371.113,4	32,4	10.206.747,4	3.279.895,8	32,1
Dana Alokasi Khusus	2.657.094,0	188.299,9	7,1	3.212.340,2	289.999,5	9,0
<b>Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya:</b>	963.629,3	254.688,9	26,4	1.064.468,6	88.443,1	8,3
Dana Penyesuaian (al.DD)	963.629,3	254.688,9	26,4	1.064.468,6	88.443,1	8,3
<b>Transfer Pemerintah Provinsi:</b>	641.268,4	63.192,0	9,9	727.679,9	106.902,9	14,7
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Prov	557.548,6	63.192,0	11,3	632.452,7	106.902,9	16,9
Bantuan Keuangan dr Prov	83.719,8	0,0	0,0	95.227,2	0,0	0,0
<b>Lain-Lain Pendapatan Yang Sah</b>	448.740,4	6.847,3	1,5	582.493,5	20.771,9	3,6
Pendapatan Hibah	13.650,0	1.480,1	10,8	149.224,6	1.816,2	1,2
Pendapatan Lainnya (al. DD)	435.090,5	5.367,3	1,2	433.268,9	18.955,7	4,4
<b>JUMLAH BELANJA</b>	17.893.469,7	1.852.472,0	10,4	19.392.517,7	2.226.572,2	11,5
<b>Belanja Operasi</b>	13.231.636,6	1.612.995,7	12,2	14.189.941,8	2.023.698,9	14,3
Belanja Pegawai	7.272.100,8	1.145.667,9	15,8	7.681.600,4	1.285.173,5	16,7
Belanja Barang	4.177.410,9	305.555,3	7,3	4.371.149,5	369.259,1	8,4
Bunga	21.156,3	15.636,3	73,9	6.120,0	0,0	0,0
Subsidi	26.943,3	7.897,7	29,3	27.965,3	8.786,3	31,4
Hibah	882.786,5	132.302,1	15,0	1.478.816,0	354.034,5	23,9
Bantuan Sosial	101.530,7	5.936,3	5,8	94.153,2	3.213,2	3,4
Bantuan Keuangan	749.708,0	0,0	0,0	530.137,4	3.232,3	0,6
<b>Belanja Modal</b>	4.620.168,5	238.808,5	5,2	5.168.849,3	202.071,0	3,9
Belanja Tanah	120.170,2	14.902,9	12,4	60.413,9	1.663,6	2,8
Belanja Peralatan dan Mesin	480.017,2	11.064,5	2,3	475.374,1	29.144,4	6,1
Belanja Gedung dan Bangunan	1.101.077,8	35.661,7	3,2	1.292.679,4	27.852,6	2,2
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.816.873,3	176.776,1	6,3	2.984.161,9	142.619,7	4,8
Belanja Aset Tetap Lainnya	90.087,5	362,9	0,4	96.406,8	451,7	0,5
Belanja Aset Lainnya	11.942,6	40,3	0,3	11.454,0	0,0	0,0
<b>Belanja Tak Terduga</b>	41.664,6	667,8	1,6	33.726,5	802,3	2,4
Belanja Tak Terduga	41.664,6	667,8	1,6	33.726,5	802,3	2,4
<b>JUMLAH TRANSFER</b>	1.902.902,3	86.351,7	4,5	2.231.166,4	146.576,0	6,6
<b>Transfer Bagi Hasil Pendapatan</b>	622.052,6	71.728,8	11,5	657.792,6	131.194,3	19,9
Bagi Hasil Pajak ke Kabupaten/Kota	615.727,5	71.728,8	11,6	650.654,6	131.194,3	20,2
Bagi Hasil Retribusi ke Kabupaten/Kota	4.469,9	0,0	0,0	5.395,2	0,0	0,0
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya ke Kabupaten	1.855,2	0,0	0,0	1.742,8	0,0	0,0
<b>Transfer Bantuan Keuangan</b>	1.280.849,7	14.622,9	1,1	1.573.373,8	15.381,6	1,0
Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	34.020,0	0,0	0,0	451.704,8	400,0	0,1
Bantuan Keuangan ke Desa	1.240.714,7	14.597,9	1,2	1.105.397,7	10.811,8	1,0
Bantuan Keuangan Lainnya	6.115,1	25,0	0,4	16.271,4	4.169,8	25,6
<b>TOTAL BELANJA + TRANSFER</b>	19.796.372,1	1.938.823,7	9,8	21.623.684,1	2.373.148,2	11,0
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	-695.667,5	3.717.280,5	-18,7	-1.226.340,0	2.020.098,1	-60,7
<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	1.159.947,7	0,0	0,0	1.328.225,3	136.166,2	10,3
Penggunaan SiLPA	1.088.888,7	0,0	0,0	1.275.575,3	126.136,6	9,9
Pencairan Dana Cadangan	70.909,0	0,0	0,0	32.500,0	10.020,2	30,8
Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	0,0	0,0		150,0	9,4	6,3
Pinjaman Dalam Negeri-Bank	0,0	0,0		20.000,0	0,0	0,0
<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	360.481,8	31.653,8	8,8	106.010,0	25.734,4	24,3
Pembentukan Dana Cadangan	50.926,2	0,0		0,0	0,0	
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	307.555,6	31.653,8	10,3	87.509,2	25.734,4	29,4
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri -	2.000,0	0,0		18.500,8	0,0	0,0
<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	799.465,9	-31.653,8	-4,0	1.222.215,4	110.431,8	9,0
<b>SiLPA</b>	103.798,4	3.685.626,7	2,8	-4.124,7	2.130.529,9	-0,2